



Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kabupaten Wajo
Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena ridhoNya Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Dokumen Roadmap SIDa ini merupakan amanah Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan perekonomian daerah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan dalam penyusunan Dokumen Roadmap SIDa Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 ini. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam terwujudnya iklim inovasi dan kreatif di Kabupaten Wajo.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan barokahNya bagi setiap langkah kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo.

Sengkang, 15 Desember 2020
Kepala Bappelitbangda Kab. Wajo
Selaku Tim Penyusun



ANDI PALLAWARUKKA, S.IP.
NIP. 19700815 199003 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Hubungan dengan Dokumen Lainnya	4
1.5 Sistimatika Penulisan	5
BAB II PROFIL KABUPATEN	6
2.1 Kondisi Geografis dan Demografis	6
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	6
2.1.2 Demografi	31
2.2 Kesejahteraan Masyarakat	34
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	46
2.2.3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52
2.2.4 Pangan	52
2.2.5 Pertanian	54
2.2.6 Perindustrian	55
2.2.7 Perhubungan	56
2.3 Daya Saing Daya	57
2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	57
2.3.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	46
BAB III KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI	68
3.1 Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi	70
3.2 Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbangyasa Serta Kemampuan Absorpsi Industri	72
3.3 Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik Hasil Litbangyasa serta Pelayanan Berbasis Teknologi.....	74
3.4 Budaya Inovasi	76
3.5 Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Kluster Industri Daerah dan Nasional	79
3.6 Keselarasan dengan Perkembangan Global	80
BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	83
BAB V KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI..	86
BAB VI TUJUAN DAN SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	89



BAB VII	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	90
	7.1 Strategi Penguatan SIDA	90
	7.2 Arah Kebijakan Penguatan SIDA	92
BAB VIII	FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	96
	8.1 Fokus Penguatan SIDA	96
	8.2 Program Prioritas Penguatan SIDA	99
BAB IX	INDIKATOR KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.....	105
BAB X	RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH	108



DAFTAR TABEL

2.1	Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2019	7
2.2	Daerah irigasi, Luas Rencana Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Wajo 2017	11
2.3	Sungai Menurut Panjang, Lebar dan Kedalaman di Kabupaten Wajo Tahun 2019	16
2.4	Sungai Menurut Panjang, Kecamatan dan Muara di Kabupaten Wajo Tahun 2018	16
2.5	Danau Tempe Menurut Luas dan Kedalaman di Kabupaten Wajo Tahun 2018	17
2.6	Danau/Rawa Menurut Luas di Kabupaten Wajo	17
2.7	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Berdasarkan Stasiun di Kabupaten Wajo Tahun 2018	19
2.8	Luas Lahan Kering Menurut Penggunaan di Kabupaten Wajo Tahun 2018	20
2.9	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	32
2.10	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo Tahun 2019	32
2.11	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	33
2.12	PDRB menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 Milyar	34
2.13	PDRB Kabupaten Wajo atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo (Milyar Rupiah) Tahun 2015-2019	35
2.14	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	38
2.15	Laju Implisit Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	39
2.16	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	40
2.17	Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	40
2.18	Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	42
2.19	Data Kemiskinan Kabupaten Wajo 2015-2019	45
2.20	Penduduk Miskin di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	45
2.21	IPM Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	47
2.22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	48
2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	48



2.24	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	49
2.25	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kabupaten Wajo Tahun 2015- 2019	50
2.26	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kabupaten Wajo Tahun 2016-2018	50
2.27	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Wajo Tahun 2016-2018	51
2.28	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2015-2018	51
2.29	Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015-2019	52
2.30	Persentase Wirausaha Muda Tahun 2015-2018	52
2.31	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	53
2.32	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	53
2.33	Produktivitas Padi Lokal Per Hektar Tahun 2015-2018	54
2.34	Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2018	54
2.35	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2015-2019	55
2.36	Produksi Perikanan Tahun 2015-2018	55
2.37	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Wajo ..	56
2.38	Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Wajo (Km) Tahun 2018-2019	57
2.39	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wajo (km) Tahun 2018-2019	57
2.40	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Wajo Tahun 2016-2019	58
2.41	Nilai Tukar Petani Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	59
	2.41.1 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	60
2.42	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	60
2.43	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan BPR Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018	61
2.44	Rasio Panjang Jalan PerJumlah Kendaraan Tahun 2015-2018..	61
2.45	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2019	62
2.46	Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal per Tahun Tahun 2015-2019	62
2.47	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga per Tahun 2015-2019	63
2.48	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2015-2018	63



2.49	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo Tahun 2016-2019	64
2.50	Jumlah Hotel/Wisma/Penginapan di Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	65
2.51	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2015-2019	65
2.52	Rasio Ketergantungan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	66
3.1	Daftar Inovasi Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	68
3.2	Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi	72
3.3	Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi UMKM	74
3.4	Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik Hasil Litbangyasa Serta Pelayanan Berbasis Teknologi	76
3.5	Pengembangan Budaya Inovasi	78
3.6	Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri Daerah dan Nasional	80
3.7	Keselarasan dengan Perkembangan Global	82
4.1	Permasalahan Strategi Sistem Inovasi di Kabupaten Wajo	83
4.2	Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA	85
5.1	Kondisi SIDA yang akan dicapai	87
7.1	Strategi Penguatan SIDA berdasarkan Misi Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	90
7.2	Hasil Analisis SWOT terhadap Penguatan SIDA Kabupaten Wajo	94
7.3	Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Wajo	95
8.1	Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Penguatan SIDA	96
8.2	Program Prioritas Penguatan SIDA	100
9.1	Indikator Kinerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah	105
10.1	Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	109



DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi Kabupaten Wajo	6
2.2	Peta Kemiringan Kabupaten Wajo	9
2.3	Peta Morfologi Kabupaten Wajo	9
2.4	Peta Geologi Kabupaten Wajo	10
2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Wajo	18
2.6	Peta Guna Lahan Kabupaten Wajo	21
2.7	PDRB Perkapita menurut ADHB 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019	41
2.8	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 ..	42
2.9	Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kab. Wajo Tahun 2015- 2019	44
2.10	Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kab. Wajo Tahun 2015-2019	46
2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap pengelola pemerintahan selalu menetapkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya sebagai tujuan akhir pembangunan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tantangan yang ditemui dapat saja menunjukkan kemiripan, tetapi setiap pengelola pemerintahan termasuk pula pemerintahan daerah akan menemui faktor multidimensional yang khas sesuai kompleksitas daerahnya.

Adanya otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang disertai penyerahan kewenangan dan penyerahan urusan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri mempunyai fokus utama pemerataan pembangunan. Hal tersebut memberikan kesempatan pada daerah mempercepat pencapaian tujuan akhir pembangunan. Pencapaian kesejahteraan suatu daerah ditentukan oleh daya saing dan kohesi sosial daerah tersebut. Kecenderungan perkembangan bahwa daya saing dan kohesi sosial suatu daerah tidak saja ditentukan oleh sumber daya alam daerah tersebut tetapi juga oleh upaya pemikiran.

Kepemimpinan dan inovasi sebagai salah satu variabel elemen dasar implementasi otonomi daerah merupakan penentu dalam peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Muncul atau tidak munculnya inovasi di daerah berkaitan erat dengan kepemimpinan daerah tersebut. Pemimpin yang handal dan memiliki jiwa *entrepreneur* sangat berpotensi membuat kebijakan inovasi. Kecenderungan perkembangan bahwa daya saing dan kohesi sosial suatu daerah tidak saja ditentukan oleh sumber daya alam daerah tersebut tetapi juga oleh upaya pemikiran melalui pengetahuan yang dikembangkan dan disebarluaskan. Hal tersebut merupakan pendorong berkembangnya inovasi dan difusinya. Dengan demikian, daya saing dan kohesi sosial sebagai elemen pencapaian kesejahteraan suatu daerah akan semakin ditentukan oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk menumbuhkembangkan potensi unggulan khas daerahnya.

Sistem inovasi merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan,



dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah. Sistem inovasi juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka melaksanakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), maka perlu disusun *roadmap* penguatan SIDa yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif. *Roadmap* penguatan SIDa tentunya disusun berdasarkan tema strategis yang telah ditetapkan sehingga bisa terarah dalam menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing daerah.

Roadmap atau peta rencana, adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau *foresight* yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional, dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya (BPPT, 2013). Dokumen *Roadmap* merupakan alat efektif sebagai suatu mekanisme untuk mengintegrasikan beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis. *Roadmap* juga dapat berfungsi untuk memberikan kerangka mekanisme koordinasi dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menginisiasi tindak lanjut serta sebagai katalis untuk melaksanakan langkah-langkah pembangunan yang disepakati.

Dokumen *roadmap* penguatan SIDa merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan-kegiatan kolaboratif di Kabupaten Wajo yang menuntut peran aktif dan sinergis antar elemen akademisi, bisnis dan pemerintah.



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen Roadmap Penguatan SIDA ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan bersama ini dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Roadmap Penguatan SIDA ini memuat perencanaan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi dari siapa yang melakukan, apa yang dikerjakan, dimana dilaksanakan, kapan direalisasikan, berapa yang dibutuhkan, dampak yang dirasakan, output yang dihasilkan, periode yang diperlukan dalam menghasilkan output tersebut, dan proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dimaksud secara berkala guna menentukan apakah perlu dilakukan modifikasi kegiatan yang dilaksanakan sekaligus untuk koreksi pada rencana kegiatan selanjutnya. Dokumen ini bermaksud untuk menghasilkan rumusan pengembangan potensi unggulan daerah yang telah ditetapkan sebagai tema strategik penguatan SIDA Kabupaten Wajo.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen roadmap SIDA Kabupaten Wajo menjadi panduan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melaksanakan pengembangan inovasi tema strategik yang sudah ditetapkan mulai dari hulu sampai hilir di Kabupaten Wajo.

1.4. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Roadmap SIDA merupakan salah satu alat perencanaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Wajo. Oleh sebab itu, roadmap SIDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Dokumen RPJP Nasional
2. Dokumen RPJMP Nasional
3. Dokumen RPJP Provinsi Sulawesi Selatan
4. Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
5. Dokumen RPJP Kabupaten Wajo.
6. Dokumen RPJMD Kabupaten Wajo
7. Dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah dan
8. Dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang memuat program/kegiatan setiap Perangkat Daerah.



Seperti yang telah ditetapkan, bahwa salah satu tujuan penyusunan roadmap SIDA adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RPJMD. Namun karena dokumen ini ditetapkan setelah penetapan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, maka dokumen ini diintegrasikan dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN

- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta korelasi dengan dokumen perencanaan lainnya.
- Bab II Profil Kabupaten Wajo, berisi penjelasan mengenai kondisi daerah berdasarkan aspek geografis, demografis, sosial budaya, perekonomian daerah, infrastruktur wilayah, tata ruang dan kelembagaan.
- Bab III Kondisi SIDA Saat Ini, berisi penjelasan mengenai kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri khususnya UKM, kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, budaya inovasi, keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional, dan keselarasan dengan perkembangan global.
- Bab IV Peluang dan Tantangan SIDA, berisi uraian isu-isu strategis yang penting dalam penguatan SIDA di Kabupaten Wajo, baik kondisi saat ini maupun antisipasi yang harus dilakukan di masa akan datang.
- Bab V Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
- Bab VI Fokus dan Program Prioritas
- Bab VII Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VIII Indikator Kinerja
- Bab IX Rencana Aksi



BAB II PROFIL KABUPATEN WAJO

2.1. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Wajo memiliki wilayah seluas 2.506,19 km² atau % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas wilayah administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut :

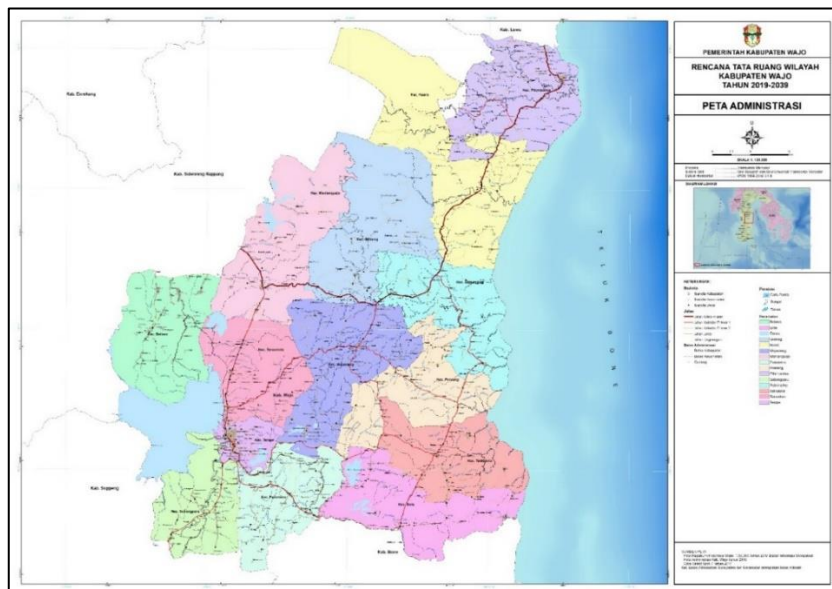
Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wajo
Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2019-2029

Secara administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 190 desa/kelurahan meliputi 48 kelurahan dan 152 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Keera (368.36 Km² atau 14,7%), dan wilayah yang paling sempit adalah Kecamatan Tempe (28,27 Km² atau 1,53%), sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Kecamatan



Pitumpanua (27 desa/kelurahan) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Maniangpajo (8 desa/kelurahan). Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian administrasi Kabupaten Wajo dapat di lihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1
Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa / Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	132.75	5.30	12	3	15
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162.10	6.47	14	2	16
4	Bola	220.13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	13
6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154.90	6.18	9	1	10
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	18
9	Tanasitolo	154.60	6.17	15	4	19
10	Belawa	172.30	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	8
12	Gilireng	147.00	5.87	8	1	9
13	Keera	368.36	14.70	9	1	10
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	27
Jumlah		2,511.19	100	142	48	190

Sumber: BPS. Wajo dalam Angka 2020 (Diolah)

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wajo secara geografis terbentang mulai 3°39'-4°16' Lintang Selatan dan 119°53'-120°27' Bujur Timur. Apabila dilihat secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo berada pada bagian selatan dan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo khususnya terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukota yang berlokasi di Sengkang, merupakan daerah transit dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Toraja.



2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Karakteristik dan kondisi wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang disebut "*Mangkalungu Ribulue, MassulappE RipottanangngE, Mattoddang Ritasi Tappareng*" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yakni:

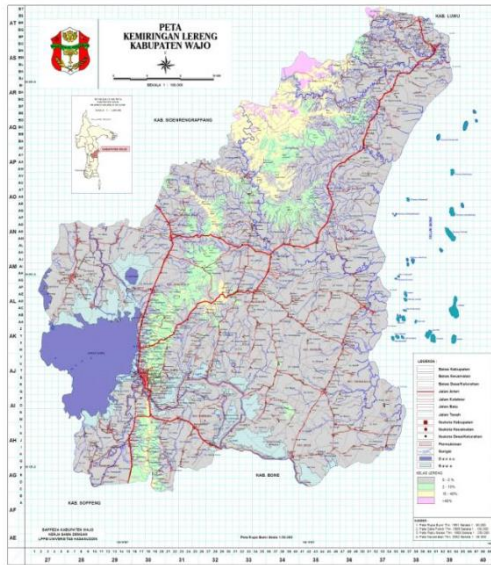
1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan;
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit, yang mana terdiri dari:

1. Sebagian besar bentuk wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2% luasnya mencapai 212.341 Ha atau sekitar 84%;
2. Lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/lereng 3-15% luas 21.116 Ha (8,43%);
3. Lahan yang berbukit dengan kemiringan/lereng di atas 16-40% luas 13.752 Ha (5,50%); dan
4. Kemiringan lahan di atas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3.316 Ha (1,32%).

Sedangkan kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan sebagai berikut.



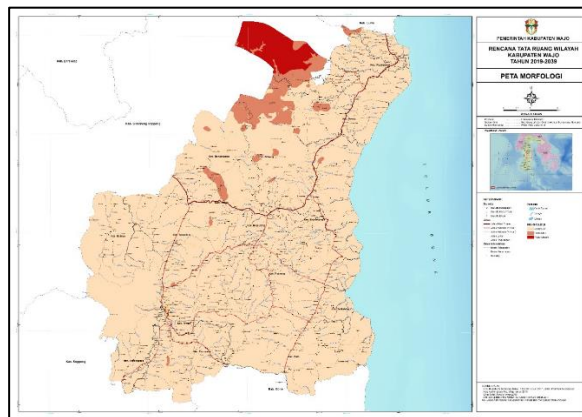


Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Kabupaten Wajo
 (Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2018)

Secara morfologis, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut:

1. 0 – 7 meter, luas 57.263 Ha atau sekitar 22,85%;
2. 8 – 25 meter, luas 94.539 Ha atau sekitar 37,72%;
3. 26 – 100 meter, luas 87.419 Ha atau sekitar 34,90%;
4. 101 – 500 meter, luas 11.231 Ha atau sekitar 4,50%; dan
5. Ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66%.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi morfologi di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut.



Gambar 2.3.
Peta Morfologi Kabupaten Wajo
 Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2019-2029

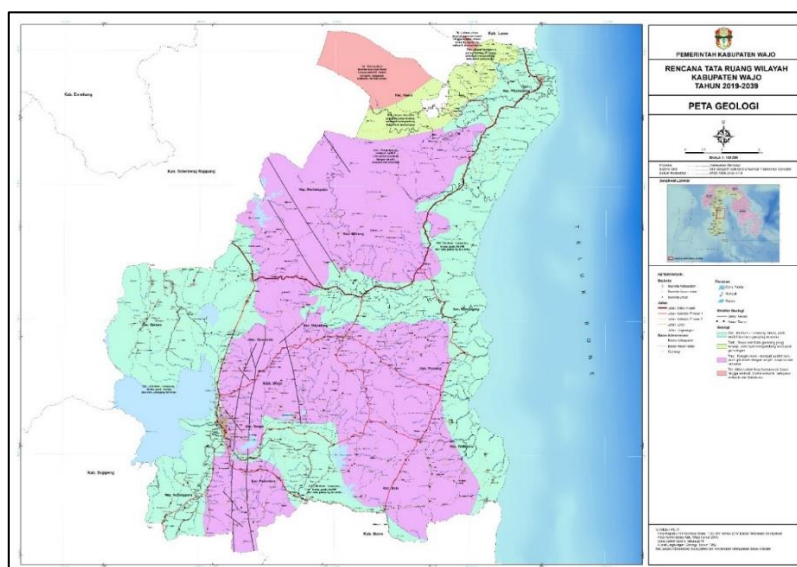


2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan informasi dari peta geologi Indonesia dengan skala 1 : 100.000, Kabupaten Wajo mempunyai struktur batuan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan induk, yaitu :

1. Daerah berstruktur batuan aliran lava tersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik. Struktur batuan ini terdapat pada bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gunung Rante Kambola yang berada di Kabupaten Tanatoraja dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah dengan berstruktur batuan napal dan batu gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua;
2. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang mempunyai ketebalan 100-500 meter. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo dan mempunyai luasan paling besar; dan
3. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi tersebar di sepanjang pantai yang berasal dari angkutan sedimen air sungai/danau.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi geologis di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4.

Peta Geologi Kabupaten Wajo

(Sumber : Bappelitbangda. RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2019-2039)



Selanjutnya menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari:

1. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan.
2. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla.
3. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua.
4. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tansitolo, Maniangpajo, Pammana dan Belawa.
5. Grumosol : Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Wajo memiliki potensi hidrologi yang meliputi daerah aliran sungai, danau, danau/rawa dan air tanah. Pada daerah irigasi di Kabupaten Wajo, terdapat 3 (tiga) kewenangan/tanggung jawab pengelolaannya, yaitu wewenang/tanggungjawab pusat dengan keluasan 9.641 terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di 2 (dua) desa dan 2 (dua) kecamatan; wewenang dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Selatan dengan keluasan 3.037 Terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di satu desa dan satu kecamatan; dan wewenang dan tanggungjawab Kabupaten Wajo dengan keluasan 17.504 terdiri dari 126 daerah irigasi di 126 (dua) desa/kelurahan tersebar di 14 kecamatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai daerah irigasi di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2.
Daerah Irigasi, Luas Rencana menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Wajo Tahun 2017

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Rencana (Ha)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Wewenang/Tanggung Jawab Pusat	9,756		
	Daerah Irigasi	9,641		
	1 Awo	5,324	Awo	Keera
	2 Kalola Kalosi	4,317	Kalola	Maniangpajo
	Daerah Irigasi Air Tanah	330		
	1 Takkalalla	115		



No	Nama Daerah Irigasi		Luas Rencana (Ha)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
	2	Bola	115		
2	Wewenang/ Tanggung Jawab Provinsi		13,025		
	Daerah Irigasi		3,037		
	1	Cilellang	732	Worongnge	Sabbangparu
	2	Cenranae	2,305	Worongnge	Sabbangparu
	Daerah Irigasi Rawa/ Daerah Irigasi Tambak		9,988		
	1	DI Rawa Pammana	2,050		Pammana
	2	DIT Akkotengeng	1,000	Akkotengeng	Sajoanging
	3	DIT Doping	1,000	Doping	Sajoanging
	4	DIT Pitumpanua	1,380		Pitumpanua
	5	DIT Sajoanging	2,175		Sajoanging
	6	DIT Takkalalla	2,383		Takkalalla
3	Wewenang / Tanggung Jawab Kabupaten		17,504		
	1	Abbanderange	500	Abbanderangnge	Pitumpanua
	2	Amesangeng I	200	Tosora	Majauleng
	3	Amesangeng II	300	Tosora	Majauleng
	4	Bakke	80	Walanga	Penrang
	5	Bulupatila	240	Patila	Pammana
	6	Labawang	113	Labawang	Keera
	7	Lakatenni	300	Wele	Belawa
	8	Pabbelle	308	Lepangeng	Belawa
	9	Salampi	200	Abbanderangnge	Pitumpanua
	10	Salo Mapejie	100	Awo	Pitumpanua
	11	Teppo Balanda	200	Lalliseng	Keera
	12	Ugi I / Manyili	300	Mallusesalo	Sabbangparu
	13	Uraiyang	108	Uraiyang	Majauleng
	14	Wajo Wajo	200	Tosora	Majauleng
	15	Aluppang	100	Aluppang	Takkalalla
	16	Ana Saloe	130	Gilireng	Gilireng
	17	Atapangnge	100	Rumpia	Majauleng
	18	Bali Elo	70	Bali Elo	Bola
	19	Barangmamase	50	Barangmamase	Sajoanging
	20	Botto Tanre	250	Botto Tanre	Majauleng
	21	Botto Benteng	300	Botto Benteng	Majauleng
	22	Bulutekaci	260	Lamata	Gilireng
	23	Callaccu	30	Mattirowalie	Maniangpajo
	24	Cempalagi	70	Cempalagi	Tempe
25	Cenranae	300	Abbanuangnge	Pammana	



No	Nama Daerah Irigasi	Luas Rencana (Ha)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
26	Dori-Dori	30	Inalipue	Tanasitolo
27	Geddongnge	275	Lagosi	Pammana
28	Ire'E	50	Ire'E	Bola
29	Jarakania	80	Tonralipue	Tanasitolo
30	Kalidongnge	200	Macanang	Majauleng
31	Karamae	100	Raddae	Penrang
32	Labukkang	100	Uraiyang	Majauleng
33	Labuangpatu	150	Mappadaelo	Tanasitolo
34	Laceppung I	40	Inalipue	Tanasitolo
35	Laceppung II	40	Inalipue	Tanasitolo
36	Lakadaung	10	Dualimpoe	Maniangpajo
37	Lamaggarang	60	Anabanua	Maniangpajo
38	Lamalua	50	Tonralipue	Tanasitolo
39	Lamara Awotarae	30	Kalola	Maniangpajo
40	Lamate	200	Anabanua	Maniangpajo
41	Manessi	50	Minangatellue	Maniangpajo
42	Lapatoleng	500	Macanang	Majauleng
43	Lapoloaju	40	Sogi	Maniangpajo
44	Laputeng	100	Mamminasae	Gilireng
45	Lare'E	200	Pammana	Pammana
46	Larukkaeto	30	Belawa	Belawa
47	Limpomajang Lompo Labawi	120	Limpomajang	Majauleng
48	Masara	80	Abbanderangnge	Pitumpanua
49	Lompo Labojo	400	Liu	Sabbangparu
50	Lompo Towesse	500	Walennae	Sabbangparu
51	Macero	320	Macero	Belawa
52	Malingmongeng	100	Lapaukke	Pammana
53	Maminasae	200	Mamminasae	Gilireng
54	Manri	200	Watang Rumpia	Majauleng
55	Manurung	20	Manurung	Bola
56	Maroanging	70	Macanang	Majauleng
57	Maroanging	130	Cina	Pammana
58	OngkoE	100	OngkoE	Belawa
59	Palaguna	50	Lempa	Pammana
60	Palolloi	350	Wele	Belawa
61	Pangempangnge	160	Lamata	Gilireng
62	Parigi	150	Parigi	Takkalalla
63	Pasa-Pasa	70	Uraiyang	Majauleng
64	Pasir Putih	60	Pasir Putih	Bola



No	Nama Daerah Irigasi	Luas Rencana (Ha)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
65	Patemma	500	Lapaukke	Pammana
66	Peneki	100	Parigi	Takkalalla
67	Salo Barue	100	Wage	Sabbangparu
68	Salotengnga	50	Pallimae	Sabbangparu
69	Sanreseng Ade	50	Sanreseng Ade	Bola
70	Soppae	500	Ongkoe	Belawa
71	Tancung	50	Tancung	Tanasitolo
72	Teppo Batue	300	Tua	Majauleng
73	Teppo Panasae	70	Uraiyang	Majauleng
74	Teppo Waji	100	Macanang	Majauleng
75	Tobatang	30	Tobatang	Pammana
76	Tocule	250	Bola	Bola
77	Ujung Tanah	200	Ujung Tanah	Bola
78	Ujunge / Pajalele	350	Pajalele	Tanasitolo
79	UkkeE	15	Dualimpoe	Maniangpajo
80	Wecuddai	100	Wecuddai	Pammana
81	Watangteppo	100	Wage	Sabbangparu
82	Batue	150	Cinnong Tabi	Majauleng
83	Timpalaja	40	Uraiyang	Majauleng
84	Mabbucu Ulu Tanre	50	Uraiyang	Majauleng
85	Lamasewanua	200	Tajo	Majauleng
86	Labulo-Bulo	200	Cinnong Tabi	Majauleng
87	Ladusa	40	Tajo	Majauleng
88	Latappareng	100	Limpomajang	Majauleng
89	Cingki	100	Watang Rumpia	Majauleng
90	Labette	60	Tadangpalie	Penrang
91	Kading	200	Penrang	Penrang
92	Lonrae	60	Penrang	Penrang
93	Amasaloe	150	Temmabarang	Penrang
94	Mualla	50	Assorajang	Sajoanging
95	Pappolo Lekko	200	Akkotengeng	Sajoanging
96	Bulu Mallopie	300	Sakkoli	Sajoanging
97	Ciromanie	100	Ciromanie	Keera
98	Toboko	50	Keera	Keera
99	Salo Pandang	100	Simpellu	Pitumpanua
100	Lacinde	125	Marannu	Pitumpanua
101	Cekke	85	Marannu	Pitumpanua
102	Lompo Loang	65	Lompo Loang	Pitumpanua
103	Bunga Jenne	65	Lompo Loang	Pitumpanua



No	Nama Daerah Irigasi	Luas Rencana (Ha)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
104	Tobaralla	70	Tobbarakka	Pitumpanua
105	Aggattungeng	40	Pallimae	Sabbangparu
106	Teppo Batue	50	Teppo Batue	Pammana
107	Ulu Galung	50	Lempa	Pammana
108	Lawarengnge	50	Taddangpalie	Pammana
109	Lapao	80	Ujung Tanah	Bola
110	Lakaluku	50	Lempong	Bola
111	Ceppaga	150	Ceppaga	Takkalalla
112	Lagoari	80	Lagoari	Takkalalla
113	Lebongnge	40	Tancung	Tanasitolo
114	Abbolongeng Katampue	40	Pincengpute	Tanasitolo
115	Waroriaja	150	Wajoriaja	Tanasitolo
116	Lajokka	30	Tonralipue	Tanasitolo
117	Cirowalie	50	Waetuwo	Tanasitolo
118	Teppoe	80	Tonralipue	Tanasitolo
119	Salodua	40	Mattirowalie	Maniangpajo
120	Ajutalie Appewalie	60	Mattirowalie	Maniangpajo
121	Langkauttu	15	Mattirowalie	Maniangpajo
122	Bulu Seppang	20	Abbanuangnge	Maniangpajo
123	Makkalu	20	Dualimpoe	Maniangpajo
124	Assorajang	60	Sogi	Maniangpajo
125	Karame Salotengnga	350	Ongkoe	Belawa
126	OngkoE	350	OngkoE	Belawa

Sumber : Wajo dalam Angka 2017. BPS. 2018 (Diolah)

Sedangkan hidrologi ditinjau dari sungai, danau dan rawa di Kabupaten Wajo, terdapat 33 (tiga puluh tiga) sungai di mana yang terpanjang adalah Sungai Gilireng/Akkotengeng sepanjang 77 Km dan terpendek adalah Sungai Lapinggo sepanjang 2 km, dan 15 (lima belas) danau di mana yang terluas adalah Danau Tempe seluas 9,342 Ha dan terkecil adalah Danau Dorie seluas 6 Ha.

Untuk lebih jelas mengenai sungai, danau/rawa di Kabupaten Wajo Tahun 2017 dapat di lihat pada Tabel 2.3. dan Tabel 2.4. berikut ini.



Tabel 2.3.
Sungai menurut Panjang, Lebar dan Kedalaman
Di Kabupaten Wajo Tahun 2019

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Siwa	20.5	70	0.85
2	Awo	43.5	85	0.65
3	Keera	27	65	0.6
4	Gilireng	61.5	40	0.35
5	Bila / Belawa	15	40	0.4
6	Cenranae	47	115	0.7
7	Walanae	28.5	95	0.55

Sumber : Wajo dalam Angka 2019 (Diolah)

Tabel 2.4
Sungai Menurut Panjang, Kecamatan dan Muara
di Kabupaten Wajo Tahun 2018

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan	Muara
1.	Walanae	28.5	Sabbangparu	Teluk Bone
2.	Cenranae Menraleng - Wajo	47.0	Tempe, Majauleng, Pammana, Bola	Teluk Bone
3.	Cenranae/ Labulang	13.0	Sajoanging	Teluk Bone
4.	Bulete/ Awo	52.0	Pitumpanua	Teluk Bone
5.	Gilireng/ Akkotengeng	77.0	Sajoanging, Majauleng, Takkalalla	Teluk Bone
6.	Peneki	21.0	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
7.	Campi	5.0	Takkalalla, Penrang	Teluk Bone
8.	Doping	10.0	Penrang	Teluk Bone
9.	Laliseng	16.0	Keera	Teluk Bone
10.	Keera	27.0	Keera	Teluk Bone
11.	Kulampu	18.0	Keera	Teluk Bone
12.	Siwa	20.5	Pitumpanua	Teluk Bone
13.	Buila/ Kalola	17.0	Belawa, Tanasitolo	Teluk Bone
14.	Laponggo	2.0	Gilireng	Teluk Bone
15.	Batumanuk	6.0	Bola	Teluk Bone
16.	Bila	17.0	Belawa, Tanasitolo	Danau Tempe
17.	Belawa	11.0	Belawa	Danau Sidenreng
18.	Belle	13.0	Belawa	Danau Sidenreng
19.	Bonge	5.0	Sajoanging	Teluk Bone
20.	Laponggo	6.0	Sajoanging	Teluk Bone
21.	Cilelang	9.5	Sabbangparu	Danau Tempe
22.	Lapotta	-	Majauleng	-
23.	Labette	-	Penrang	-
24.	Cellue	-	Bola, Pammana, Takkalalla, Majauleng	-



No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan	Muara
25.	Polla	-	Sajoanging	-
26.	Salo Bakka	-	Sajoanging	-
27.	Ambo Dongi	-	Pammana	-
28.	Worongnge	-	Sabbangparu	-
29.	Kading	-	Penrang	-
30.	Lompo Lagau	-	Penrang	-
31.	Lompo Lajonga	-	Sabbangparu	-
32.	Mualla	-	Penrang	-
33.	Jangkali	-	Bola	-

Sumber : BPS. Wajo dalam Angka 2018 (Diolah)

Tabel 2.5
Danau Tempe menurut Luas dan Kedalaman di Kabupaten Wajo Tahun 2018

Nama Danau	Kedalaman (m)	Luas (km ²)
Danau Tempe	0 – 1	35.90
	0 – 2	35.42
	2 – 2.5	20.90
	> 2.5	1.20

Sumber : BPS. Wajo dalam Angka 2019

Tabel 2.6
Danau/Rawa Menurut Luas di Kabupaten Wajo Tahun 2018

No	Nama Danau	Luas (ha)	Kecamatan
1.	Danau Tempe	9,342	Tempe, Tanasitolo, Sabbangparu, Belawa
2.	Danau Buaya	360	Takkalalla
3.	Danau Lalongpakka	1,960	Maniangpajo/ Belawa
4.	Danau Lampulung	1,000	Tempe/ Pammana
5.	Danau Penrang Riawa	25	Tanasitolo
6.	Danau Cenranae	24	Sajoanging
7.	Danau Dorie	6	Takkalalla
8.	Danau Lapapolo	37	Takkalalla
9.	Danau/ Rawa Sempangnge	343	Majauleng
10.	Danau/ Rawa Palisu	767	Bola
11.	Danau/ Rawa Baleng	620	Pammana
12.	Danau/ Rawa Bola	1,920	Bola
13.	Danau/ Rawa Salo	890	Bola
14.	Danau/ Rawa Penrang	726	Penrang
15.	Danau/ Rawa Palaguna	420	Pammana
Jumlah		18,543	

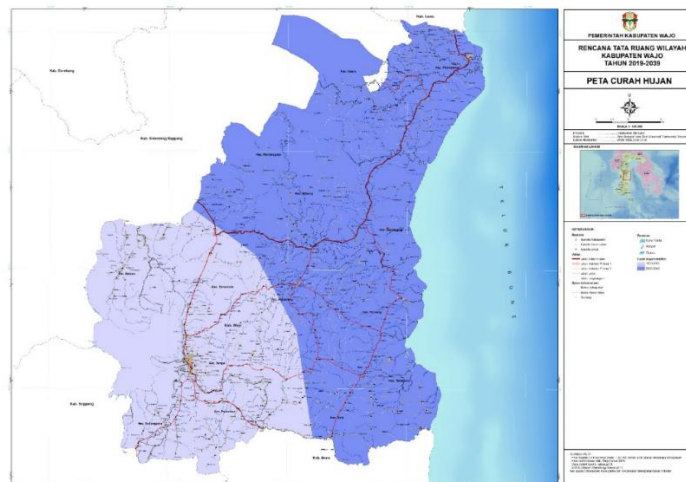
Sumber : BPS. Wajo dalam Angka 2018



2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Wajo sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan suhu kurang lebih 27°C-30°C yang tandai dengan adanya bulan kering/musim hujan dan bulan basah/ musim kemarau. Musim hujan setiap tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni, kecuali di bagian utara yaitu di Kecamatan Pitumpanua terdapat musim hujan mirip dengan Kabupaten Luwu serta bulan-bulan selanjutnya adalah lembab. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Antara bulan November sampai dengan bulan Maret terdapat curah hujan yang cukup akibat pengaruh musim hujan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Curah hujan untuk 3 tahun terakhir mencapai rata-rata 1.510 mm dan 128 hari hujan.

Untuk lebih jelas mengenai curah hujan di Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada Gambar 2.5. Peta Curah Hujan di Kabupaten Wajo berikut ini.



Gambar 2.5.
Peta Curah Hujan Kabupaten Wajo
(Sumber: RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2019-2039)

Tabel 2.7
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan
Berdasarkan Stasiun di Kabupaten Wajo Tahun 2018

Bulan	Curah Hujan (mm ²)								Hari Hujan							
	Ongkoe/ Menge	Tingara Posi	Ujung Kessi	Welle	Menge	Canru	Watang Kalola	Luræ	Ongkoe/ Menge	Tingara Posi	Ujung Kessi	Welle	Menge	Canru	Watang Kalola	Luræ
Januari	110	36	37	88	5	136	120	25	7	5	2	5	7	6	5	12
Februari	180	0	59	157	3	181	55	16	7	0		6	4	8	3	10
Maret	182	7	60	97	5	186	45	13	6	1	5	5	5	8	3	9
April	278	32	79	316	9.5	154	390	19	12	4	9	10	8	8	9	12
Mei	391	124	154	450	25	366	575	55	14	15	12	20	13	17	10	23
Juni	545	73	228	559	192	534	520	46	13	8	7	15	14	23	12	22
Juli	160	29	87	252	71	77	370	25	7	4	4	9	6	3	8	19
Agustus	15	0	7	23	15	69	22	13	1	0	1	2	5	3	3	9
September	62	0	28	35	47	99	36	24	3	0	3	1	3	5	3	9
Oktober	11	0	30	66	25	156	70	97	1	0	2	1	2	8	1	5
November	162	3	88	134	87	38	90	102	11	1	9	4	7	2	2	13
Desember	50	7	40	45	77	286	160	32	3	2	3	3	6	17	2	12

Sumber : BPS. Wajo dalam Angka 2019 (Diolah)



2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya

Penggunaan lahan di Kabupaten Wajo Tahun 2018 pada luas lahan kering meliputi tegal/kebun seluas 36.706 ha, ladang/huma seluas 12,177 ha, perkebunan seluas 29.413 ha, tanah tanaman kayu-kayuan hutan rakyat seluas 7,226 ha, penggembalaan/padang rumput seluas 10,655 ha, lahan sementara tidak diusahakan seluas 7.780 ha, lain-lain (tambak, kolam, empang, hutan negara) seluas 21,401 ha, dan lahan bukan pertanian seluas 24.517 ha.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan kering menurut penggunaan di Kabupaten Wajo tahun 2018, dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Luas Lahan Kering Menurut Penggunaan
Di Kabupaten Wajo Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tegal/Kebun	36.706
2	Ladang/Huma	12.177
3	Perkebunan	29.413
4	Tanah Tanaman Kayu-Kayuan Hutan	7,226
5	Penggembalaan/Padang Rumput	10.655
6	Lahan Sementara Tidak Diusahakan	7.780
7	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan)	21,401
8	Lahan Bukan Pertanian	24.517
	Jumlah	149.875

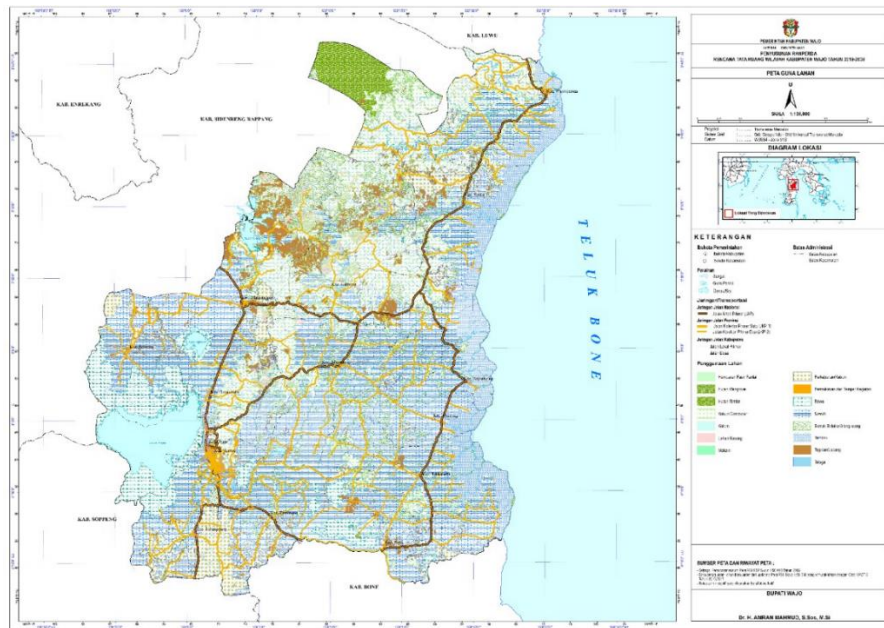
Sumber : BPS. Wajo dalam Angka 2019 (Diolah)

Penyebaran permukiman di Kabupaten Wajo terpusat pada sepanjang pusat kabupaten (Kota Sengkang), pusat-pusat kecamatan, dan sepanjang ruas jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman. Pola penyebaran permukiman cukup merata mengisi keseluruhan ruang di Kabupaten Wajo. Daerah sepanjang pesisir pantai kurang diminati untuk menjadi kawasan permukiman, mengingat aksesibilitas yang terbatas serta kondisi topografi yang berawa-rawa. lahan persawahan yang ada, tidak seluruhnya menggunakan sistem irigasi teknis. Hanya 29,018 ha yang menggunakan sistem irigasi teknis, yaitu



Awo, Bila Kalola, Belawa, dan Gilireng. Itupun untuk Gilireng baru pada tahap perencanaan. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah bahwa sebagian besar irigasi desa yang digunakan untuk pertanian lahan basah di Kabupaten Wajo dalam keadaan belum berfungsi secara optimal.

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada Gambar 2.6. Peta Guna Lahan sebagai berikut.



Gambar 2.6.
Peta Guna Lahan Kabupaten Wajo

(Sumber : Bappelitbangda. RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2019-2039)

Diperkirakan telah terjadi alih fungsi lahan (selama ini tidak terdata) sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya luas lahan bukan pertanian dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menyusun kebijakan agar alih fungsi lahan menjadi lebih terkendali antara lain dengan menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dan mengarahkan penggunaan lahan.

2.1.1.8. Kawasan Budidaya

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 telah menetapkan tentang kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang dijelaskan sebagai berikut.



1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan budidaya diklasifikasikan menjadi 9 kawasan berdasarkan peruntukannya, yaitu :

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangepajo, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging dan sebagian Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 16.469 ha;
- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat di daerah, ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Maniangepajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 37.988 ha;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian di daerah, terdiri atas:
 - a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo;
 - b) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di daerah ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 180.000 ha.
 - c) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Tanasitolo dengan luasan kurang lebih 233.816 ha;
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri dari :
 - a) kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hibrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangepajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 ha;



- b) kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20.000 ha;
- c) kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging, dengan luasan kurang lebih 142 ha;
- d) kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 ha;
- e) kawasan peruntukan perkebunan lada, pala, vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 hektar; dan
- f) kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, jambu mete, dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian



Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 ha.

- 5) Kawasan peruntukan peternakan, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan. Kawasan ini terdiri atas :
 - a) kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa dengan luasan kurang lebih 183.907 ha; dan
 - b) kawasan peruntukan ternak kecil tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.
- 6) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas :
 - a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola, kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu, kawasan pesisir Kecamatan Tempe, kawasan pesisir Kecamatan Pammana, kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla, kawasan pesisir Kecamatan Majauleng, kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo, kawasan pesisir Kecamatan Belawa, kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo, kawasan pesisir Kecamatan Keera, kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua, kawasan pesisir Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40.643 ha;
 - b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari:
 - (1) Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera, dengan luasan kurang lebih 9.100 ha; dan
 - (2) Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan



Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe dengan luasan kurang lebih 9.486 ha.

- c) Kawasan pengolahan ikan, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe;
 - d) Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola, BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo, BBI Surae Kecamatan Tempe, BBI Kecamatan Takkalalla, dan BBI Kecamatan Keera; dan
 - e) Pelabuhan Pendaratan Ikan, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging.
- 7) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan, terdiri atas :
- a) kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral, yang merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat. Wilayah usaha pertambangan rakyat berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, sebagian wilayah Kecamatan Bola, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan
 - b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo.



- 8) Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas:
 - (1) kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana; dan
 - (2) rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan di Kecamatan Keera, dan kawasan industri batu bata ditetapkan di kecamatan Tanasitolo.
 - b) Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Sajoanging;
 - c) Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.
- 9) Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:
- a) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:
 - (1) Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
 - (2) Kawasan situs Geddong'E di Kecamatan Pammana; dan
 - (3) Kawasan Situs Makam Raja-Raja di Kecamatan Majauleng
 - b) Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
 - (1) Gua Nippon di Kecamatan Tempe;
 - (2) Taman Wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
 - (3) Permandian alam di Kecamatan Maniangpajo; dan
 - (4) Tanjung Tanah Merah Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla.
 - c) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas:
 - (1) Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
 - (2) Kawasan Tepian Sungai CenranaE di Kecamatan Tempe;
 - (3) Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkana di Kecamatan Tanasitolo.
- 10) Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas :
- a) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah



perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe, Kawasan Perkotaan Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kawasan Perkotaan Keera Kecamatan Keera, Kawasan Perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kawasan Perkotaan Paria Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang; dan

- b) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera.

11) Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas:

- a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:
 - (1) Kantor Komando Distrik Militer 1406 Wajo di Kecamatan Tempe; Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe;
 - (2) Kantor Kepolisian Resort Wajo di Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe;
 - (3) Kantor Kepolisian Sektor tersebar di 14 (empat belas kecamatan) dalam wilayah kabupaten.
- b) Kawasan peruntukan perdagangan, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri atas:
 - (1) Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Sengkang Kecamatan Tempe, kawasan perdagangan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perdagangan Keera Kecamatan Keera, kawasan perdagangan Anabanua Kecamatan



Maniangpajo, dan kawasan perdagangan Atapange Kecamatan Majauleng; dan

- (2) Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe.
- c) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana yaitu kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan asumsi lokasi yang direncanakan harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang cukup tinggi/ terjangkau oleh bantuan dari luar daerah ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Tempe, Kecamatan Majauleng, dan Kecamatan Bola.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang berfungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan alami maupun buatan. Kawasan lindung terdiri atas 7 : kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.yang terdiri atas

- 1) Kawasan hutan lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 7.679,93 ha.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan resapan air yang meliputi areal yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air



permukaan selain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng di atas 45%. Kawasan resapan air ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampulung Kecamatan Tempe, dan Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dengan luasan kurang lebih 18.543 ha.

3) Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri atas:

a. Kawasan sempadan pantai berdasarkan ketentuan antara lain daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Kawasan sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla.

b. Kawasan sempadan sungai, yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;

(2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan

(3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 m dari tepi sungai.

Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E.

c. Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo, dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan :



- (1) Daratan dengan jarak paling sedikit 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - (2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- d. Kawasan ruang terbuka hijau, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas:
- a. Kawasan cagar alam laut, ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 ha;
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoangning, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;
 - c. Kawasan wisata alam ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan
 - d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.
- 5) Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
- a. Kawasan rawan banjir, ditetapkan di sebagian DAS Walanae dan Danau Tempe di Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Sabbangparu, muara sungai Siwa dan sepanjang DAS Cenranae di Kecamatan Bola, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Pammana;



- b. Kawasan rawan tanah longsor, ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Pitumpanua.
- 6) Kawasan lindung geologi, yang terdiri dari atas:
- a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun, kawasan rawan gas beracun ditetapkan di :
 - (1) Kawasan rawan gas beracun di Kampung Baru Kecamatan Gilireng dengan luasan kurang lebih 6,3 ha;
 - (2) Kawasan rawan gas beracun di Desa Patila Kecamatan Pammana dengan luasan kurang lebih 6,25 ha;
 - (3) Kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok Sengkang (*seismick* Wasambo).
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan cekungan air tanah (CAT) di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Maniangpajo; dan kawasan sempadan mata air ditetapkan di kawasan mata air Kelurahan Talotenreng dan Kelurahan SumpabakaE Kecamatan Sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah daerah.
- 7) Kawasan lindung lainnya, terdiri dari atas:
- a. Kawasan wisata berburu merupakan kawasan yang yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 ha;
 - b. Kawasan pengungsian satwa merupakan kawasan yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penambahan sekitar empat ribu jiwa. Pada tahun 2015 jumlah



penduduk sebanyak 393.218 jiwa dan pada tahun 2019 mencapai 397.814 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk tidak diiringi dengan bertambahnya luas wilayah, maka kepadatan penduduk juga bertambah dari tahun ke tahun. Dengan luas wilayah 2.506,19 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Wajo mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 158,73 jiwa/km² yang berarti bahwa secara rata-rata tiap satu kilometer persegi wilayah Wajo didiami oleh 158 penduduk.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2015	393.218	2.506,19	156,90
2016	394.495	2.506,19	157,41
2017	395.583	2.506,19	157,84
2018	396.810	2.506,19	158,33
2019	397.814	2.506,19	158,73

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2019

Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Tempe, dengan luas wilayahnya yang hanya 38,27 km² atau 1,53% dari luas wilayah Kabupaten Wajo. Jumlah penduduknya mencapai 66.461 jiwa. Sehingga, kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 1.737 jiwa/km². Tidak dapat dipungkiri, statusnya sebagai ibukota kabupaten menjadikan Kecamatan Tempe sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, sehingga banyak penduduk menetap di wilayah ini.

Berbanding terbalik dengan Kecamatan Tempe, Kecamatan Keera merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yakni hanya 61 jiwa/km². Kecamatan ini merupakan kecamatan terluas, yakni seluas 368,36 km² (14,70% dari luas Kabupaten Wajo) namun jumlah penduduknya hanya 22.464 jiwa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar lahan di Kecamatan Keera digunakan sebagai lahan pertanian.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut
Kecamatan di Kabupaten Wajo Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk		Wilayah		Kepadatan per km ²
	Jumlah (jiwa)	%	Luas (km ²)	%	
Sabbangparu	26.326	6,62	132,75	5,30	198
Tempe	66.461	16,71	38,27	1,53	1.737



Kecamatan	Penduduk		Wilayah		Kepadatan per km ²
	Jumlah (jiwa)	%	Luas (km ²)	%	
Pammana	31.860	8,01	162,10	6,47	197
Bola	19.792	4,98	220,13	8,78	90
Takkalalla	21.044	5,29	179,76	7,17	117
Sajoanging	19.070	4,79	167,01	6,66	114
Penrang	15.856	3,99	154,90	6,18	102
Majauleng	31.862	8,01	225,92	9,01	141
Tanasitolo	40.081	10,08	154,60	6,17	259
Belawa	32.594	8,19	172,30	6,87	189
Maniangpajo	16.348	4,11	175,96	7,02	93
Gilireng	11.444	2,88	147,00	5,87	78
Keera	22.529	5,66	368,36	14,70	61
Pitumpanua	42.547	10,70	207,13	8,26	205

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2019

Selama tahun 2015-2019, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) atau persentase penambahan penduduk Kabupaten Wajo dalam jangka waktu tersebut berkisar kurang dari satu persen. Nilainya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, LPP Kabupaten Wajo sebesar 0,25%. Beberapa pendapat mengelompokkan negara-negara berdasarkan LPP. Data membuktikan bahwa untuk negara-negara maju, selalu memiliki LPP kurang dari satu persen bahkan mendekati nol persen. Hal ini karena jumlah penduduk secara tidak langsung berbanding terbalik dengan usaha dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Maka, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo cukup berhasil.

Komposisi penduduk Kabupaten Wajo terdiri atas laki-laki 190.693 jiwa dan perempuan 207.121 jiwa (61,5%) dengan rasio jenis kelamin sebesar 92,67 yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Selama lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni masih berkisar pada angka 92.

Tabel 2.11
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
2015	393.218	0,32	91,53
2016	394.495	0,32	91,72
2017	395.583	0,28	91,84



Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	396.810	0,31	91,97
2019	397.814	0,25	92,07

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2019

2.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator perekonomian secara makro, yaitu melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dan membandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

PDRB Kabupaten Wajo sejak tahun 2015-2019, khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK Tahun 2010) senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. PDRB ADHK pada tahun 2019 tumbuh sebesar Rp. 12.858.449,69 yang relatif jauh lebih besar bila dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya Rp. 11.071.645,14.

Tabel 2.12
PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.358,02	3.646,14	2.865,47	3.931,12	3.861,95
B	Pertambangan dan Penggalian	2.525,20	2.410,22	2.408,56	2.039,38	2.208,68
C	Industri Pengolahan	389,20	419,52	445,93	470,77	492,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,69	12,39	13,06	13,97	15,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,89	4,02	4,30	4,65	4,90



Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
F	Konstruksi	949,92	1.010,18	1.071,74	1.135,40	1.177,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.651,37	1.796,89	1.939,31	2.097,93	2.216,20
H	Transportasi dan Pergudangan	358,06	376,06	403,19	441,89	482,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35,97	38,73	41,95	46,42	49,39
J	Informasi dan Komunikasi	193,51	211,62	234,62	262,17	290,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	256,91	296,49	303,16	308,28	310,13
L	Real Estate	352,15	375,28	398,25	419,44	444,17
M.N	Jasa Perusahaan	12,06	13,00	14,02	15,54	17,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	432,77	427,36	447,35	473,80	543,35
P	Jasa Pendidikan	362,04	389,63	423,56	463,86	492,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,60	146,17	158,81	173,46	188,22
R,S,T, U	Jasa Lainnya	43,30	47,04	52,48	59,28	63,89
PDRB		11.071,65	11.620,74	12.225,77	12.357,35	12.858,45

Sumber: BPS. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2019.

Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Wajo (Milyar Rupiah) Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.984,67	5.715,02	6.250,21	6.486,68	6.467,63
B	Pertambangan dan Penggalian	3.077,51	2.864,98	2.836,41	2.540,65	2.852,34
C	Industri Pengolahan	544,83	614,07	690,04	753,18	797,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,79	10,53	12,93	14,44	15,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	4,391	4,72	5,24	5,85	6,27



Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019**
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	1.430,59	1.584,57	1.740,12	1.900,56	2.030,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.058,67	2.440,62	2.676,92	3.005,68	3.267,43
H	Transportasi dan Pergudangan	500,48	529,60	563,87	626,21	688,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,82	52,40	58,56	66,20	72,02
J	Informasi dan Komunikasi	197,02	222,36	256,28	293,59	328,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	353,19	417,21	445,73	471,16	485,68
L	Real Estate	500,08	563,75	609,69	661,88	711,94
M,N	Jasa Perusahaan	16,41	18,71	20,65	23,24	26,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.235,37	639,58	685,55	748,99	879,25
P	Jasa Pendidikan	501,26	562,74	637,29	721,61	778,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207,78	235,91	264,77	298,74	331,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	60,34	67,98	77,84	90,38	99,42
PDRB		15.119,01	16.544,74	17.832,11	18.709,89	19.838,81

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2019, BPS

Selama tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo sebesar 4,06%. Perekonomian Kabupaten Wajo pada tahun 2019 tersebut tumbuh cepat dibanding tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2019 lebih cepat sebesar 2,99% dibanding tahun 2018 yang tercatat 1,07%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2018 diakibatkan oleh pertumbuhan yang cukup dalam pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8,3% pada tahun 2019. Disamping itu, terdapat peningkatan pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat menjadi 14,68% yang sebelumnya tercatat sebesar 5,91%. Namun demikian, terjadi penurunan di beberapa



lapangan usaha salah satunya di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menurun menjadi negatif 1,76.

Tabel 2. 26
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019 (Persen)

Kate- gori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,79	8,58	6,02	1,70	-1,76
B	Pertambangan dan Penggalian	9,27	-4,55	-0,07	-15,33	8,30
C	Industri Pengolahan	6,86	7,79	6,30	5,57	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,96	6,04	5,36	6,98	7,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,82	3,37	6,96	8,08	5,36
F	Konstruksi	7,75	6,34	6,09	5,94	3,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	8,81	7,93	8,18	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	6,64	5,03	7,21	9,60	9,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	7,69	8,31	10,64	6,40
J	Informasi dan Komunikasi	9,96	9,36	10,87	11,74	10,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,86	15,41	2,25	1,69	0,60
L	Real Estate	8,53	6,57	6,12	5,32	5,90
M,N	Jasa Perusahaan	5,46	7,76	7,89	10,84	10,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	-1,25	4,68	5,91	14,68
P	Jasa Pendidikan	8,14	7,62	8,71	9,51	6,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,66	7,80	8,65	9,22	8,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,11	8,63	11,56	12,95	7,78
PDRB		7,06	4,96	5,21	1,08	4,06

Memasuki tahun 2019 perekonomian Kabupaten Wajo tampak mengalami perkembangan positif sebesar 2,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 perkembangan ini lebih melambat. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Di mana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo. Sektor Pertanian menyumbang sebesar 34,60% terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya Sektor Perdagangan merupakan andalan kedua Kabupaten Wajo yang menyumbang sebesar 16,47% terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Sedangkan



Sektor Pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang sebesar 14,38%. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun periode tahun 2015 hingga 2019 tercatat sebesar 4,47%.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Apabila inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa disuatu wilayah juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan menurunnya nilai tukar mata uang. Keberadaan inflasi ini berhubungan dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan mampumempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan atau penurunan tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Laju inflasi Kabupaten Wajo tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar, hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa omoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Namun sejak tahun 2015, perhitungan laju inflasi Kabupaten Wajo dihitung berdasarkan wilayah bagian atau region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini, BPS Kabupaten Wajo menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Wajo berdasarkan Region Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2015 – 2019 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Laju Inflasi (%)					Rerata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Inflasi Kabupaten Wajo	0,11	0,5	0,18	1,02		1,97
2	Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	0,7	0,3	1,04	3,50	2,35	1,58
3	Inflasi Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	3,17

Sumber : BPS. 2019 (Diolah)



Perkembangan Inflasi Kabupaten Wajo yang oleh BPS Kabupaten Wajo berdasarkan Region, digantikan dengan perhitungan Laju Implisit yang merupakan perhitungan indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen. Laju Implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan merupakan salah satu indikasi perhitungan Laju Inflasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai Laju Implisit Kabupaten Wajo menurut tahun 2015 – 2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Laju Implisit Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,09	5,59	3,16	2,07	1.48
B	Pertambangan dan Penggalian	(9,15)	(2,47)	(0,93)	5,79	3.66
C	Industri Pengolahan	8,74	4,56	5,72	3,39	1.22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(8,10)	1,50	16,51	4,36	0.45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,39	3,94	3,80	3,31	2.73
F	Konstruksi	8,78	4,16	3,51	3,10	3.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,61	8,95	1,63	3,79	2.91
H	Transportasi dan Pergudangan	13,88	0,75	(0,69)	1,33	0.76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	3,93	3,18	2,17	2.25
J	Informasi dan Komunikasi	(3,26)	3,20	3,95	2,52	0.85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,41	4,48	3,95	2.47
L	Real Estate	8,56	5,78	1,91	3,08	1.58
M,N	Jasa Perusahaan	8,71	5,80	2,31	1,55	1.64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,15	3,57	2,40	3,16	2.36
P	Jasa Pendidikan	4,63	4,32	4,18	3,39	1.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	5,32	3,30	3,30	2.19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,25	3,72	2,63	2,80	2.06
PDRB		3,41	4,26	2,45	3,81	1,90

Sumber : BPS Kabupaten Wajo 2017; Bappeda, 2019. Diolah.

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara



2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB Per kapita ADHK menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk dan menggambarkan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita pun merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Wajo, dengan perhitungan tahun dasar 2010, juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 sebesar 13.65 Juta Rupiah, meningkat di tahun 2015 menjadi 15,11 Juta Rupiah. Dan 16,54 Juta Rupiah di tahun 2016 meningkat lagi sebesar 17.89 Juta Rupiah pada tahun 2017. Berikut adalah tabel PDRB perkapita tahun 2015-2019 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2.16
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB Perkapita ADHK 2010 (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	38,45	10,37	28,16	6,73
2016	41,94	9,08	29,46	4,62
2017	45,08	7,48	30,91	4,92
2018*	47,15	4,60	31,14	0,76
2019**	49,86	5,77	32,32	3,79

Sumber : BPS Kab. Wajo 2020

* : Angka sementara

** : Angka sangat sementara

Sedangkan perkembangan PDRB Perkapita ADHB di Kabupaten Wajo jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

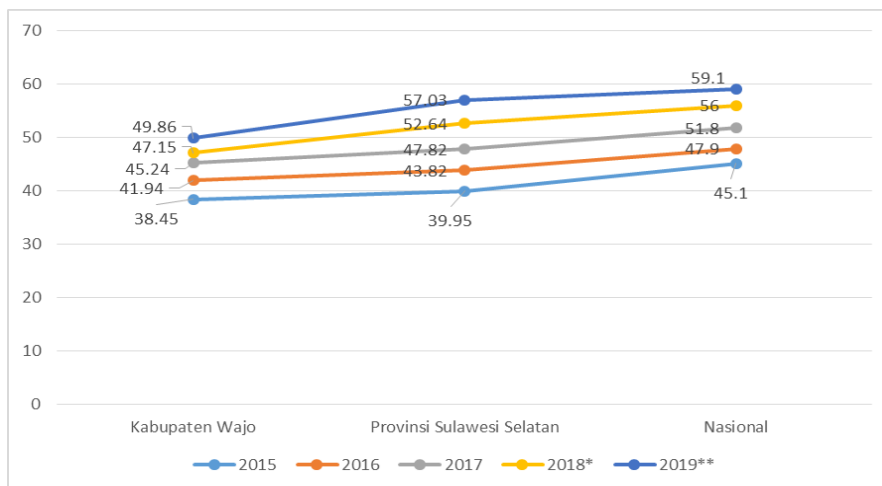
Tabel 2.17
Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Wajo
Tahun 2015 – 2019

PDRB Perkapita ADHB	2015	2016	2017	2018*	2019**
Kabupaten Wajo	38,45	41,94	45,24	47,15	49,86
Provinsi Sulawesi Selatan	39,95	43,82	47,84	52,71	57,03
Nasional	41,9	47,9	51,8	55,9	59,10

Sumber : RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021.



Mengenai perkembangan PDRB Perkapita ADHB 2010 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 dapat di lihat pada gambar berikut :



Gambar 2.7
PDRB Perkapita Menurut ADHB 2010 Kabupaten Wajo
Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kabupaten Wajo 2017

PDRB (ADHB) Kabupaten Wajo di tahun 2015 meningkat menjadi 38,45 dan terus meningkat di tahun 2016 sebesar 41,94, tahun 2017 menjadi 45,24, di tahun 2018 sebesar 47,15, dan pada tahun terakhir sebesar 49,86. Sedangkan PDRB perkapita (ADHB) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar 39,95%. Meningkatkan lagi menjadi 43,82 pada tahun 2016, di tahun 2017 menjadi 47,82. Dan Tahun 2018 menjadi 52,65. Meningkatkan hingga tahun 2019 menjadi 57,03.

2.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang seringkali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1.

Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati



angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

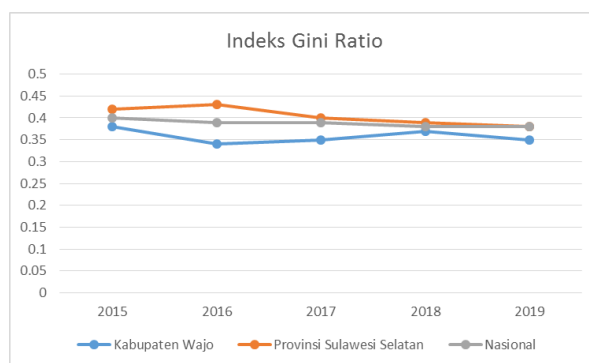
1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini $\geq 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin membaik, di mana pada tahun 2015 sebesar 0,38 menurun menjadi 0,35 di tahun 2018 dan stagnan di tahun 2019 menjadi 0,38.

Tabel 2.18
Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo
Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Gini Rasio Kabupaten Wajo	0,38	0,34	0,35	0,37	0,35
2	Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan	0,42	0,43	0,40	0,39	0,38
3	Indeks Gini Rasio Nasional	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat

Sumber : Bappeda. Kajian Gini Rasio Kabupaten Wajo 2015. Diolah.



Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019
(Sumber : Bappeda. Kajian Gini Rasio Kabupaten Wajo 2015. Diolah)



Pergeseran angka indeks gini Kabupaten Wajo yang semakin menurun memperlihatkan adanya pergeseran ke arah peningkatan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invorement*.

2.2.1.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

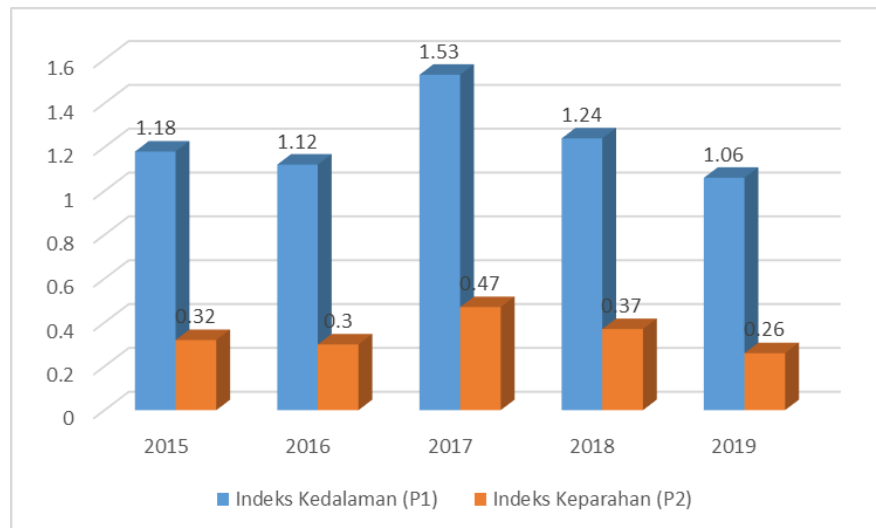
Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama periode 2015 - 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 253.164 Rupiah/Kapita/Bulan, meningkat menjadi 258.821 Rupiah/Kapita/Bulan tahun 2016. Sedangkan tahun 2017 menjadi sebesar 264.376 Rupiah/Kapita/Bulan dan tahun 2018 menjadi 297.121 Rupiah/Kapita/Bulan. Dan Tahun 2019 menjadi 311.017 Rupiah/Kapita/Bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,18 di tahun 2015 sedangkan tahun 2016 menjadi 1,12 dan tahun



2017 menjadi 1.53. Dan di dua tahun terakhir menurun menjadi 1,24 di tahun 2018 dan di 2019 menurun menjadi 1,06. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,01 pada tahun 2015, di tahun 2016 menurun menjadi 0,30. Sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 0,47 dan tahun 2018 menurun menjadi 0,37 dan 2019 menjadi 0,26.



Gambar 2.9
Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019
 (Sumber : BPS 2020. Diolah)

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2015-2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung berfluktuasi. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 2015 sebesar 7.66% turun menjadi 7,47% pada tahun 2016. Tahun 2017 menurun menjadi 7.38%, tahun 2018 meningkat kembali menjadi 7.50% kemudian tahun 2019 menurun lagi menjadi 6,91.

Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2015 sebanyak 30.080 jiwa, tahun 2016 menurun menjadi 29.460 jiwa. Tahun 2017 menurun menjadi 29.190 jiwa di tahun 2018 meningkat menjadi 29.730 jiwa namun tahun 2019 kembali menurun menjadi 27.480 jiwa.

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas



mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berikut adalah tabel penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2015–2019 di Kabupaten Wajo.

Tabel 2.19
Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita/bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
2015	253.164	30,08	7,66	1,18	0,32
2016	258.821	29,46	7,47	1,12	0,30
2017	264.376	29,19	7,38	1,53	0,47
2018	297.121	29,73	7,50	1,24	0,30
2019	311.017	27,48	6,91	1,06	0,26

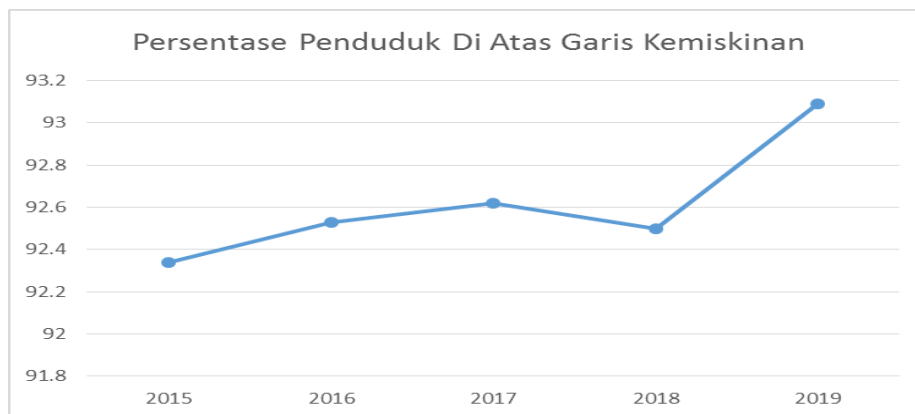
Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka, 2020

Tabel 2.20
Penduduk Miskin Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/bulan	Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan (%)
2015	253.164	30,08	7,66	92,34
2016	258.821	29,46	7,47	92,53
2017	264.376	29,19	7,38	92,62
2018	297.121	29,73	7,50	92,50
2019	311.017	27,48	6,91	93,09

Sumber : TNP2K, 2019 (Diolah)





Gambar 2.10
Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo
Tahun 2015-2019

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 66,49 dan kemudian meningkat menjadi 69,05 pada tahun 2019. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,48 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Wajo tumbuh sebesar 2,15 poin. IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”, karena termasuk dalam *range* $60 \leq \text{IPM} < 70$.

Berdasarkan pembentuknya, setiap komponen mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2018. Angka harapan hidup meningkat dari 66,79 tahun menjadi 67,17 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 hanya 6,8 tahun atau setara sekolah dasar.

Angka tersebut tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan masih tergolong rendah sehingga perlu adanya peningkatan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan sebesar 12,399 juta



rupiah per tahun. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2018 yakni senilai 12,06 juta per tahun.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihanpilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
IPM Kabupaten Wajo Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Komponen	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kesehatan					
a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,23	66,38	66,52	66,79	67,17
2.	Pendidikan					
a.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,07	13,08	13,09	13,11	13,13
b.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,37	6,38	6,78	6,79	6,80
3.	Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)	11.047	11.681	11.681	12.057	12.399
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,90	67,52	68,18	68,57	69,05

Sumber : BPS. Trend Pembangunan Indikator Sosial Kabupaten Wajo 2016; Statistik Daerah Kabupaten Wajo 2020 (Diolah)

2.2.2.2. Ketenagakerjaan

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi *International Labour Organization*, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja disebut juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja. Angkatan kerja dapat disebut sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja, yang terdiri dari



mereka yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau pengangguran. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja, yang terdiri dari penduduk usia kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja.

TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Persentase ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019, TPAK di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 59,12% menjadi 62,38%.

Tabel 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Wajo
Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Usia Kerja (>15 Tahun)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2015	160.165	59,51
2016	170.165	62,80
2017	174.019	63,10
2018	179.164	59,12
2019	190.085	62,38

Sumber : BPS Kabupaten Wajo. 2019

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

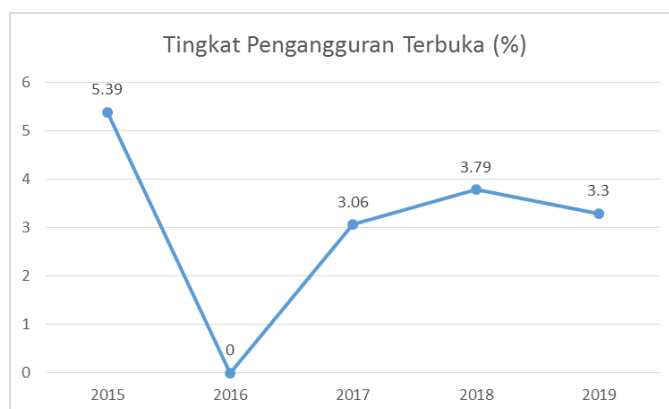
Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wajo menurun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Di tahun 2015 sebanyak 5,39%. Tahun 2017 menurun menjadi 3,06% dan di tahun 2018 naik menjadi 3,79%. Dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,30%.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo
Tahun 2015 – 2019

Tahun	Penduduk Usia Kerja >15 Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2015	160.165	5.39
2016	170.165	-
2017	174.019	3.06
2018	179.164	3.79
2019	190.085	3,30

Sumber : BPS. Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Wajo 2019





Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka

3) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 – angka pengangguran). Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja tersebut selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 185,6% dan mengalami penurunan menjadi 96,96% pada tahun 2019.

Tabel 2.24
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

No	Tahun	Uraian		
		Penduduk yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang bekerja
1	2015	297.285	160.165	185,61
2	2016	295.004	170.165	173,36
3	2017	5.884	174.019	3,381
4	2018	172.382	179.164	96,21
5	2019	183.804	190.085	96,69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo Tahun 2019. Wajo Dalam Angka 2019. Wajo Dalam Angka 2020.

4) Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang



digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja
Kabupaten Wajo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Produk Domestik Bruto (PDB)	7,06	4,98	5,22	5.46
2	Jumlah Tenaga Kerja	3,951	6.802	6.910	7.136
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja		0,18	0,07	0,08	0,08

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo Tahun 2019

5) Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) merupakan perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kelebihan dari sisi *supply side* dikurangi dengan *demand side* (pengangguran).

Tabel 2.26
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Kabupaten Wajo Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Kesempatan Kerja	9.471	9.461	9.461
2	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	298.042	300.893	302.781
Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja		3,18	3,14	3,12

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Wajo Tahun 2019

6) Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas



dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator ini digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Tabel 2.27
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Wajo Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	63,056	77,496	165,063
2	Total Kesempatan Kerja	9.471	9.461	167,138
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja		665.78	819.11	98.76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo Tahun 2019 (Diolah)

7) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Peningkatan yang cukup tajam yaitu pada tahun 2015 ke tahun 2016. Keadaan tersebut di atas berpengaruh pada peningkatan rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 2.918 orang tiap jenis usaha menjadi 3.702 orang tiap jenis usaha.

Permasalahan kemudian timbul pada jumlah seluruh usaha PMA/PMDN. Meskipun nilai meningkat hingga Rp 6.620.859.960.372 tapi banyaknya usaha menurun dari 11.032 buah menjadi 759 buah. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut pada tahun berikutnya.

Tabel 2.28
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2015 - 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	32.196	2.494	1.190	2.810
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	11.032	39	445	759
3	Rasio daya serap tenaga kerja	2,918	63,949	2,674	3,702

Sumber : Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2019



2.2.3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2.3.1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2015-2016 berada di nilai 100% namun 3 tahun terakhir mengalami penurunan menjadi 99,37% di tahun 2019.

Tabel 2.29
Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	1783	2584	3493	7543	8319
2	Jumlah seluruh UKM	1783	2584	3546	7596	8372
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	100	98,51	99,30	99,37

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, dan Perindustrian. 2019.

2.2.3.2. Persentase Wirausaha Muda

Jumlah wirausaha muda tiap tahunnya mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2015 mencapai 87,97% dan pada tahun 2018 menjadi 88,04%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya minat pemuda untuk melakukan wirausahawan.

Tabel 2.30
Persentase Wirausaha Muda Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah wirausaha muda	2450	2450	2450	2452
2	Jumlah seluruh wirausaha	2785	2785	2785	2785
3	Persentase wirausaha muda	87,97%	87,97%	87,97%	88,04%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

2.2.4. Pangan

2.2.4.1. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 penguatan cadangan pangan di Kabupaten Wajo sebesar 47,354%, dan pada 2 tahun berikutnya mengalami peningkatan



menjadi 54,700 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 21,208 ton. Berikut tabel penguatan cadangan pangan di Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2018.

Tabel 2.31
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten	47,354	58,354	54,700	21,308
2	100 ton	100	100	100	100
3	Penguatan cadangan pangan (%)	47,354	58,354	54,700	21,308

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2019

2.2.4.2. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Wajo mengalami fluktuasi pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Wajo tercatat sebesar 106.658 dan di tahun 2016 turun menjadi **27.676**. Pada tahun 2017-2018 kembali meningkat menjadi 30.843 di tahun 2018. Untuk lebih jelasnya data penanganan daerah rawan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan beras	425.144	443.447	443.848	450.072
2	Kebutuhan beras	42.557	41.501	41.615	43.079
Ketersediaan pangan		9,990	10,721	10,721	10,821
3	n gizi kurang < -2 SD	1.354	68	264	27
4	n balita yang dikumpulkan PSG	22.869	34.370	32.401	21.345
Preferensi Energi		5,92	0,20	0,81	0,98
5	Keluarga pra- sejahtera	78.384	10.289	11.280	11.310
6	Keluarga Sejahtera Satu	28.258	17.376	19.481	19.521
Kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera satu		32.208	34.213	30.761	30,831
Penanganan daerah rawan pangan		106.658	27.676	30.773	30.842

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo Tahun 2019



2.2.4.3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (ton) di Kabupaten Wajo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim di mana terjadi banjir hampir setiap tahun di beberapa wilayah. Banjir tersebut terjadi karena curah hujan yang tinggi, kurangnya daya tampung Danau / Sungai serta kurang memadainya sarana keirigasian.

Tabel 2.33
Produktivitas Padi Lokal Per Hektar Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	756,387	788,953	820,838	800,050
2	Luas areal Panen padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	154,607	204,112	145,461	147,604
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4.89	3.87	5.64	5.42

2.2.5. Pertanian

Cakupan Bina Kelompok Petani lima tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kelompok petani yang sudah mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya, sehingga sebagian dari total 3,875 kelompok petani telah memanfaatkan hasil bantuan tersebut.

Tabel 2.34
Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n	1,300	1,601	1,406	1,294
2	Jumlah kelompok tani	2.532	2.532	3.834	3,875
3	Cakupan Bina Kelompok Petani	51,34%	63,23%	36,67%	33,39%

Sumber : DPTHP Kab. Wajo, Tahun 2019



2.2.6. Perindustrian

Belum adanya data spesifik yang menghitung jumlah cakupan kelompok pengrajin. Sedangkan data di dalam tabel didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah industri kerajinan yang bersumber dari data industri. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kualitas di bidang industri kerajinan.

Tabel 2.33
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n	15	13	30	28
2	Jumlah kelompok pengrajin	53	153	1.032	281
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	28,30%	8,50%	3%	9,96%

2.2.7. Kelautan dan Perikanan

2.2.7.1. Produksi Perikanan

Selama kurun waktu 2015-2019 produksi perikanan di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi perikanan di dukung oleh berbagai faktor yakni di antaranya luas areal pemeliharaan ikan, alat penangkapan ikan, dan armada yang dipakai untuk menangkap ikan.

Sesuai data dalam tabel terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan yakni dari 146,05 % tahun 2015 meningkat menjadi 157,92 % di tahun 2018.

Tabel 2. 36
Produksi Perikanan Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah produksi ikan (ton)	435.130,15	434.786,82	522.261,87	523,591.40
2	Target daerah (ton)	297.927,51	323.713,28	326.465,70	331.564.08
3	Persentase produksi perikanan	146,05	134,31	159,97	157,92

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wajo,

Sektor pertanian dalam arti luas mencakup sub-sektor tanaman pangan, sup-sektor peternakan dan sub-sektor perikanan merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Wajo dalam kurun 2015-2019.



Walaupun merupakan menjadi kontributor terbesar, akan tetapi sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2015 sektor pertanian dapat memberikan kontribusi sebesar 32,97 %, tahun 2016 sebesar 34,54 %, tahun tahun 2017 sebesar 35,05 % dan mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018 sebesar 34,67 % dan pada tahun 2019 sebesar 32,60 %.

Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Wajo

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,05	34,67	32,60
Pertambangan dan Penggalian	15,91	13,58	14,38
Industri Pengolahan	3,87	4,03	4,02
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	9,76	10,16	10,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,01	16,06	16,47
Transportasi dan Pergudangan	3,16	3,35	3,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,35	0,36
Informasi dan Komunikasi	1,44	1,57	1,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,52	2,45
Real Estate	3,42	3,54	3,59
Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,13
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	4,00	4,43
Jasa Pendidikan	3,57	3,86	3,92
Jasa Kesehatan dan Kegaitan Sosial	1,48	1,60	1,67
Jasa Lainnya	0,44	0,48	0,50
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kab Wajo

2.2.8. Perhubungan

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang yang ada di Kabupaten Wajo merupakan investasi yang menunjang pembangunan



di Kabupaten Wajo dan merupakan salah satu asset di dalam penghitungan PAD Kabupaten Wajo.

Panjang jalan di Kabupaten Wajo tahun 2019 adalah 1.264 km, jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan negara 135 km, jalan propinsi 120 km, jalan kabupaten 1.009 km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2019, jaringan jalan kondisi baik mencapai 38 % (383,32 Km), sedang mencapai 5,36 % (54,10 Km), rusak mencapai 7,19 % (72,48 Km), dan rusak berat mencapai 49,45 % (498,73 Km).

Tabel 2.38
Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Wajo (km) Tahun 2018-2019

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019
Negara	135	135
Provinsi	120	120
Kabupaten Wajo	1.009	1.009
Jumlah	1.264	1.264

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka 2020. BPS. Diolah

Tabel 2.39
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Wajo (km) Tahun 2018-2019

Kondisi Jalan	2018	2019
Baik	270,32	383,32
Sedang	68,19	54,10
Rusak	114,85	72,48
Rusak Berat	555,26	498,73
Jumlah	1.008,62	1.008,62

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka 2020. BPS. Diolah

2.3. DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata



pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan.

Menurut kelompok makanan, rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi adalah kelompok makanan dan minuman jadi, yakni sebesar 184.882 rupiah sebulan, atau 34,2 persen dari total pengeluaran makanan. Menurut kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran tertinggi adalah untuk kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga, yakni sebesar 234.448 rupiah sebulan, atau 43,9 persen dari total pengeluaran non makanan.

Tabel 2.40
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Wajo Tahun 2016-2019

Kelompok Komoditas	2016	2017	2018	2019
MAKANAN				
1. Padi-padian	65.974	61.417	62.024	60.235
2. Umbi-umbian	2.078	2.329	2.724	2.665
3. Ikan/udang/cumi/kerang	51.486	55.648	58.180	61.031
4. Daging	5.404	11.029	7.736	10.428
5. Telur dan susu	20.982	27.604	27.321	25.997
6. Sayur-sayuran	22.610	27.383	23.677	24.505
7. Kacang-kacangan	4.323	6.144	5.541	6.834
8. Buah-buahan	19.520	17.464	21.318	32.524
9. Minyak dan kelapa	12.444	14.145	12.364	11.623
10. Bahan minuman	16.146	18.920	18.118	16.080
11. Bumbu-bumbuan	10.725	12.958	12.765	13.351
12. Konsumsi lainnya	11.616	14.089	11.951	13.722
13. Makanan dan minuman jadi	99.296	139.614	146.442	184.882
14. Rokok	55.009	64.706	65.057	76.909
Jumlah Makanan	397.613	473.450	475.219	540.787
BUKAN MAKANAN				
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	199.081	228.653	232.249	234.448
2. Aneka komoditas dan jasa	67.565	85.500	82.853	103.300
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	31.024	39.058	40.006	46.468
4. Komoditas tahan lama	62.797	1.836	72.999	84.780
5. Pajak, pungutan, dan asuransi	12.465	24.838	28.229	31.638
6. Keperluan pesta dan upacara	12.729	24.838	34.662	33.472



Kelompok Komoditas	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bukan Makanan	385.662	399.131	490.999	534.106
Jumlah	783.275	872.581	966.218	1.074.893

Sumber : Kabupaten Wajo dalam Angka 2017, 2018, 2019, 2010. BPS. Diolah

2.3.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

NTP dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. NTP Kabupaten Wajo tahun 2015 sebesar 104,73 dan tidak mengalami perubahan di mana tidak menurun dan juga tidak mengalami peningkatan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 kenaikan menjadi 100,85 dan kembali tidak mengalami perubahan di mana tidak menurun dan juga tidak mengalami peningkatan pada tahun 2018.

Tabel 2.41
Nilai Tukar Petani Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Indeks uang diterima petani (It)	124,77	129,60	129,06	129,06
2	Indeks yang di bayar petani (Ib)	119,13	123,75	127,97	127,97
3	Nilai tukar Petani	104,73	104,73	100,85	100,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Kab. Wajo Tahun 2019

2.3.1.3. Indikator Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB)

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB merupakan perbandingan jumlah nilai ekspor dan impor barang dan jasa dengan PDB yang setiap tahunnya



mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan jumlah ekspor dan impor sebesar 2.058.666,01 dengan rasio sebesar 0,14. Dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 2.741.173,68 dengan rasio sebesar 0,14.

Tabel 2.42
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa	2.058.666,01	2.440.621,5	2.741.173,68	2.741.173,68
PDB	15.119.010,29	16.540.503,20	17.897.717,74	18.709.043,59
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	0,14	0,15	0,15	0,14

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo. 2019

2.3.1.4. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum pada tahun tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 sampai pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan menurun di 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk lebih jelasnya, data rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum di Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel. 2.43
Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah pinjaman di bank umum	2.481.460.855.477	2.769.979.874.297	1.950.865.566.134	1.741.627.930.844
Dana pihak ketiga di bank umum	1.769.648.404.239	1.699.310.036.861	1.690.667.775.508	1.606.055.016.780
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1,40	1,63	1,15	1,08

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Wajo Tahun 2019

2.3.1.5. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 rasio pinjaman



sebesar 3,50 dan menurun selama 4 (empat) tahun terakhir menjadi 2,71 di tahun 2018. Berikut tabel rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR di Kabupaten Wajo pada tahun 2015-2019.

Tabel 2.44
Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR
Kabupaten Wajo Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah pinjaman di BPR	6.889.867.575,5	7.997.833.380,8	7.669.867.501	6.740.213.011,8
Dana pihak ketiga di BPR	1.967.084.122,4	2.323.430.714,3	2.442.856.082,8	2.483.354.686,7
Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	3,50	3,44	3,14	2,71

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Wajo Tahun 2019

2.3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

2.3.2.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2015 sebesar 0,0100 dan pada tahun 2018 menjadi 0,0084, ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Jumlah kendaraan meningkat setiap tahun, sedangkan panjang jalan setiap tahun tetap.

Tabel 2.45
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan (Km)	1.271,04	1.271,04	1.271,04	1.271,04
2	Jumlah Kendaraan	127.159	135.606	142.417	150.987
3	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo Tahun 2019

2.3.2.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah orang yang terangkut 1,680,545 orang dan barang 354.545 ton, menurun pada tahun 2019 menjadi 1,451,890 orang, namun khusus barang yang terangkut meningkat menjadi



349.580 ton. Hal ini mengindikasikan makin berkurangnya masyarakat bermobilisasi dengan angkutan umum. Kecenderungan masyarakat Kab. Wajo memanfaatkan jasa kurir / angkutan barang saja.

Tabel 2.46
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang yang terangkut Angkutan umum (Orang)	1.326.000	1.121.600	1.105.430	1.105.310	1,102,301
Jumlah barang yang terangkut Angkutan umum (Ton)	354.545	354.545	347.430	347.480	349,580
Total	1.680.545	1.476.145	1.452.860	1.452.790	1.451.890

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. 2020

2.3.2.3. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun mengalami kenaikan pada tahun 2015-2018 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2015 jumlah orang yang terangkut 527,520 meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,272,760 orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,272,040.

Tabel 2.47
Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang	467.520	357.520	347.230	636.240	635.520
Jumlah Barang	600.00	618.000	636.540	636.520	636,520
Jumlah orang/ barang melalui terminal per tahun	467.520	975.520	983.770	1.272.760	1.272.040

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. 2020

Jumlah orang / barang yang melalui dermaga per tahun berfluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah orang yang terangkut 199,597, meningkat pada tahun 2016



menjadi 415,785 orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 229,442, pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 700,164 orang hingga pada 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 80,731 orang. Berikut tabel jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun.

Tabel 2.48
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Per Tahun
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Orang	515.597	364.785	124.442	67.924	64.333
2	Jumlah Barang	48.000	51.000	105.000	632.240	16.398
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga per tahun	199.597	415.785	229.442	700.164	80.731

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. 2020

2.3.2.4. Ketaatan terhadap RTRW

Saat ini rasio kesesuaian dengan RTRW kabupaten masih rendah, diindikasikan dengan telah dilaksanakannya beberapa program pembangunan pada program utama RTRW Kabupaten. Rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 0,82 pada tahun 2015, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,81. Hal ini disebabkan adanya perubahan RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 beserta Perdanya.

Tabel 2.49
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi RTRW	69,29	70,95	72,61	73,27
2	Rencana Peruntukan	84,79	86,82	88,85	90,82
3	Ketaatan terhadap RTRW	0,82	0,82	0,82	0,81

Sumber : Dinas BMCKJK Tahun 2019. Bappeda Tahun 2019

2.3.2.5. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Restoran adalah tempat usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahannya dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna



jasa. Restoran mempunyai ciri bahwa pembeli dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata atau Kanwil Parpostel setempat.

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 adalah sebanyak 194 unit. Tempe merupakan kecamatan dengan jumlah rumah makan terbanyak yaitu sebanyak 74 unit.

Tabel 2.50
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan
di Kabupaten Wajo Tahun 2016-2019

Kecamatan	2016	2017	2018	2019
Sabbangparu	-	-	-	1
Tempe	51	63	63	74
Pammana	-	-	-	10
Bola	-	1	1	2
Takkalalla	-	-	-	5
Sajoanging	-	2	2	4
Penrang	-	-	-	2
Majauleng	4	4	4	15
Tanasitolo	-	-	-	11
Belawa	1	1	1	15
Maniangpajo	-	-	-	19
Gilireng	-	-	-	-
Keera	6	6	6	8
Pitumpanua	9	9	9	28
Wajo	71	86	86	194

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wajo. 2020.

2.3.2.6. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Danau Tempe sebagai ikon Kabupaten Wajo karena obyek wisata ini telah dikenal wisatawan domestik dan mancanegara. Pada tahun 2019, tercatat jumlah kunjungan ke Danau Tempe sebanyak 1.987 wisatawan, atau menurun sekitar 43,39 persen dibandingkan tahun 2018. Jumlah tersebut keseluruhannya merupakan wisatawan mancanegara.



Untuk menunjang pariwisata, sangat diperlukan fasilitas akomodasi yang memadai. Jumlah penginapan di Kabupaten Wajo sebanyak 30 hotel/wisma/penginapan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 7 persen dibandingkan tahun 2018. Keseluruhan hotel masih merupakan hotel non bintang. Meskipun demikian, kualitas hotel dianggap layak bagi wisatawan.

Tabel 2.51
Jumlah Hotel/Wisma/Penginapan
di Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hotel Berbintang	0	0	0	0	0
2	Hotel Non Bintang	23	23	23	28	30
3	Total	23	23	23	28	30

Sumber : BPS Kabupaten Wajo

2.3.2.7. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan tersebut di atas memicu penggunaan sarana telekomunikasi (HP/Telepon). Pada tahun 2015, 71,44% atau sebesar 393,218 penduduk yang menggunakan HP/telepon, kemudian meningkat 93,57% di tahun 2019 atau sebesar 396,810 orang

Tabel 2.52
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang memiliki HP	279,053	334,769	351,358	369,767	369,767
2	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	1,873	1,764	1,629	1,521	1,521
3	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	280,926	336,533	352,987	371,288	371,288
4	Jumlah penduduk	393,218	394,495	395,583	396,810	396,810
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	71.44%	85.31%	89.23%	93.57%	93.57%

Sumber : Dinas Komunikasi & Informatika Tahun 2019



2.3.2.8. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (disebut dengan angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang.

Semakin tingginya persentase Rasio ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara di Kabupaten Wajo, data rasio ketergantungan dalam kurun waktu berfluktuasi namun tidak signifikan. Dari tahun 2015 rasio ketergantungan sebesar 47,91% yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Di tahun 2016 menurun menjadi 45,26%, dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 0,31% menjadi 45,57%.

Tabel. 2.53
Rasio Ketergantungan Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Usia <15 Tahun (%)	Penduduk Usia 15-64 Tahun (%)	Penduduk Usia >65 Tahun (%)	Rasio Ketergantungan
2015	24,48	68,52	6,99	45,94
2016	24,20	68,70	7,10	45,57
2017	23,94	68,84	7,22	45,26
2018	23,70	68,96	7,35	45,02
2019	23,47	69,04	7,49	44,85

Sumber : Kabupaten Wajo Dalam Angka 2020

Selama periode 2015-2019 rasio ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka beban tanggungan Kabupaten Wajo sebesar 45,94 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun



2016 rasio ketergantungan penduduk turun menjadi 45,57 persen, kemudian 45,26 persen pada tahun 2017 dan 45,02 persen pada tahun 2018. Saat ini tahun 2019, rasio ketergantungan penduduk berada pada posisi 44,85 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 45 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).



BAB III
KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI

Kondisi SIDA Kabupaten Wajo yang diuraikan dalam bab ini adalah capaian atau kondisi secara umum dari ruang lingkup penguatan dan kerangka kebijakan SIDA. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo hingga tahun 2020 menghasilkan beberapa inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan, wewenang, tugas dan fungsinya. Bahkan beberapa di antaranya telah meraih penghargaan.

Tabel 3.1
Daftar Inovasi Kabupaten Wajo Tahun 2015-2019

NO.	NAMA/JUDUL INOVASI	INOVATOR/ PERANGKAT DAERAH
1.	Akselerasi Pelayanan Kepegawaian dengan <i>Mobile Sicakep</i>	H. Amiruddin A., S.Sos., M.M. (BKDD)
2.	Sejuta Kantong Air	Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Gerak Posyandu	Dinas Kesehatan
4.	Sistem Online Penerimaan Siswa Baru	Dinas Pendidikan
5.	<i>One Day Service</i>	Disdukcapil
6.	Sipuket (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Terintegrasi)	Dinas Pertanian dan Peternakan
7.	Pollkultur Rumput Laut, Bandeng dan Kepiting Bakau	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	Integrasi SIM RS dengan BRI (<i>e-hospital</i>)	RSUD Lamadukelleng
9.	Penyederhanaan Administrasi Izin Tenaga Kesehatan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
10.	Kotaku dan Desaku Pada <i>Mabello</i>	Dinas Tarkim dan Kebersihan
11.	Aplikasi Pelayanan Asministrasi Desa/Kelurahan dan Website Kecamatan	Kecamatan Keera
12.	Pelayanan Urusan Anda Selesai	Kecamatan Tempe
13.	Sigap (Siaga-Tanggap) 1 Jam Pencurian Ternak	Kecamatan Takkalalla
14.	Percepatan Pelayanan Administrasi melalui Call Centre	Kecamatan Penrang
15.	Sistem Pelaporan Data Kependudukan Berbasis Web	Kecamatan Penrang
16.	Lorong <i>Mapaccing</i>	Andi Muhammad Baso Iqbal, S.T., M.Si (Kecamatan Tempe)
17.	Petani Untung dengan Mina Padi	Andi Fakhru Rijal Burhanuddin, ST., M.M (Kecamatan Penrang)
18.	Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Informasi Kecamatan	Andi Mamu, S.STP., M.Si (Kecamatan Pitumpanua)



NO.	NAMA/JUDUL INOVASI	INOVATOR/ PERANGKAT DAERAH
19.	Sistem Informasi Ijin Mendirikan Bangunan	Andi Muhammad Alfatih, S.IP (Kecamatan Keera)
20.	Gerakan bersama Berantas Porno Aksi (<i>Candoleng-Doleng</i>) melalui Korsa Se-Desa	H. Ahmad Jahran, AR., M.Si (Kecamatan Belawa)
21.	Sedekah Sampah	Andi Ratnawati Paturusi, SH (Dinas Lingkungan Hidup)
22.	Sinfo Babe (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Obat Berbasis Website)	dr. H. Baso Rahmanuddin., M.M (Dinas Kesehatan)
23.	<i>Open Village - Sipp De</i>	Syamsul Bahri, S.IP., M.Si (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
24.	Kepegawaian Berbasis IOS dan Android	Andi Muhammad Alfatih, S.IP (Kecamatan Keera)
25.	Promosi dan Konseling Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	dr. H. Muhammad Nur Tangsi, S.Ked (Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng)
26.	Akselerasi Simba Bima (Sistem Informasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat)	Drs. H. Alamsyah, M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
27.	Penanganan dan Pencegahan Konflik Sosial dengan Pendekatan Kearifan Lokal	Drs. Andi Muhamad Yusuf Andi Baharuddin, M.M (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
28.	Masyarakat Taat Perda melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum	Drs. Andi Budi Agus, M.H. (Satuan Polisi Pamong Praja)
29.	Pelayanan Administrasi Kependudukan Masuk Kampung ta' (Permata)	Dra. Hj. Dahniar Gaffar (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
30.	Lapor Mama Papa (Laporan dan Pelayanan Organisasi dan Kepemudaan Manajemen Penanganan Masalah-Masalah Kepemudaan dan Pemuda Penyandang Disabilitas)	Andi Ahmad Ridha, S.STP (Dinas Pemuda dan Olahraga)
31.	Teras Mini Bebi	Negara Mangkubumi K, S.Pd (SMP Negeri 2 Sengkang)
32.	Kepiting dalam Galon: Penggemukan Kepiting Bakau (<i>Scylla Spp</i>) dengan Memanfaatkan Galon Air Bekas	Ir. Andi Siswati., M.Si (Dinas Perikanan Kabupaten Wajo)
33.	Si Kurung HIV AIDS	Ira Rahmayani, SKM.,M.Si Nurjannah Alwi, S.Kep.,Ners (RSUD Lamaddukelleng)
34.	Prota (Program Orang Tua Asuh)	Maisal Ali, S.Pd SMP (Tahfidz Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Anabanua)
35.	Timbangan Gelis (Tingkatkan Minat Baca dengan Gerakan Literasi Sekolah)	Hartati, S.Pd (SDN 2 Maddukkelleng)
36.	Si Miskin Pakai <i>Whatsapp</i>	Hj. St. Maifah, S.Pd.,M.Si (SMP Negeri 1 Sengkang)



NO.	NAMA/JUDUL INOVASI	INOVATOR/ PERANGKAT DAERAH
37.	Kelas Tawa (Keluarga Sehat dengan Telepon Perawat'ta)	Bambang Setiawan, S.Kep (Puskesmas Tempe)
38.	Kelas Jempol	Muhammad Arifai, S.Pd.,M.Si (SMP Negeri 2 Tanasitolo)
39.	Mata Silasri untuk Meminang Siswa	H. Marzuki, S.Pd.,M.Si (SMP Negeri 3 Majauleng)
40.	Elisabeth (<i>effective learning by singing method on elementary school</i>)	Syahrir, S.Pd., M.Pd(SDN 261 Siengkang Kec. Tempe)
41.	Teja dan OTW (Tempe Peduli Pajak dan Orang Tinggal <i>Whatsapp</i>)	Andi Abdul Dzuljalali Wal Ikram, S.STP.,M.Si (Kelurahan Tempe)
42.	Simpul Pena (Sistem Informasi PUSDALOPS Penanganan Bencana)	Drs. H. Alamsyah, HM.,M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
43.	Si Rosni Bisa Lalod	Muhammad Arifai, S.Pd.,M.Si (SMP Negeri 2 Tanasitolo)
44.	Inovasi Vanamerator Hebat Tradisional	Bakhtiar, S.Pi (Dinas Perikanan)
45.	Sistem Pertanian Terpadu (<i>integrated Farming</i>)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
46.	Layanan Pindah Datang "SIPADUPPAI"	Disdukcapil
47.	Sapi Bergulir Untuk Rakyat (SIBERUK)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
48.	<i>Oto Dottoro</i>	Dinas Kesehatan

Salah satu inovasi Kabupaten Wajo yang telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah inovasi Mobile Sicakep. Inovasi tersebut merupakan inovasi dalam pelayanan kepegawaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.

3.1. Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi

Terciptanya lingkungan yang kondusif akan sangat mendukung bagi berkembangnya inovasi di Kabupaten Wajo. Kondisi kerangka umum yang kondusif dapat diketahui dari basis data inovasi. Data mengenai inovasi-inovasi yang ada saat ini merupakan dasar (*baseline*) bagi kondisi yang ingin diperkuat dalam Roadmap SIDA Kabupaten Wajo.

Namun demikian, Kabupaten Wajo belum memiliki basis data inovasi yang meliputi seluruh data yang bisa mendorong peningkatan kapasitas inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Data-data yang terkait dengan terobosan



baru, baik dari hasil riset, kreatifitas, dan inovasi daerah tersimpan di masing-masing OPD secara terpisah dan belum bisa secara optimal diakses untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sehingga bisa dikatakan belum ada sistem informasi yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar perangkat daerah yang ada. Kelemahan dalam kepemilikan basis data inovasi mengakibatkan percepatan pembiasaan atau budaya inovasi organisasi perangkat daerah menjadi tidak optimal. Adanya konsep *Smart City* ataupun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Wajo, juga belum terlihat memberikan nilai tambah bagi perkembangan inovasi daerah, khususnya bila dilihat dari sisi penggunaan teknologi oleh pemerintah daerah.

Untuk bisa memiliki sistem *database* inovasi secara baik, memerlukan peran regulasi sebagai pijakan kebijakan yang mendasari perkembangan kegiatan inovasi daerah dan daya dukung lainnya. Roadmap SIDA yang sedang disusun ini nantinya diharapkan akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam regulasi-regulasi dan berbagai prosedur teknis yang mendukung. Sampai saat ini Kabupaten Wajo belum memiliki regulasi yang mendukung ataupun mendorong pengembangan inovasi daerah. Logikanya apabila telah ada payung hukum mengenai pengembangan inovasi daerah, akan semakin mempercepat langkah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih inovatif dan memberikan kemanfaatan secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong daya saing daerah.

Selain adanya sistem dan juga regulasi, peran infrastruktur dasar inovasi juga diperlukan dalam mendorong sistem inovasi berjalan dengan baik pada saat diimplementasikan. Pengembangan inovasi jelas memerlukan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung. Saat ini infrastruktur yang secara nyata telah ada yaitu berbagai infrastruktur yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Namun demikian, pengembangan inovasi membutuhkan lingkungan yang khusus baik pada saat perencanaan hingga peresmian (*launching*), sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung kerangka umum yang kondusif bagi inovasi adalah adanya insentif bagi para pelaku inovasi. Para aktor yang menjalankan inovasi juga perlu didukung adanya insentif yang nyata dan memadai, agar selalu semangat dan juga bisa memotivasi aktor lainnya dalam melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya. Pemberian insentif bagi kegiatan-



kegiatan yang bersifat inovatif belum dilakukan secara menyeluruh, karena memang belum memiliki landasan legal formal. Sehingga perlu dipikirkan pemberian insentif yang terencana dengan baik sehingga mampu memotivasi para aktor inovasi di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.2
Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi

No	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1	Basis data inovasi	Seluruh data terkait pengembangan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersusun basis data inovasi yang baik b. Hasil riset masih berada di OPD masing-masing dan belum dilakukan pengembangan lebih lanjut c. Pengambilan data atau informasi terkait inovasi lintas unit seringkali terhambat d. Belum adanya sistem berbasis online dalam pemanfaatan data-data inovasi dari OPD
2.	Regulasi yang kondusif bagi inovasi	Seluruh inovasi daerah untuk mendukung inovasi secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat regulasi terkait inovasi dari pemerintah b. Belum tersedia regulasi terkait inovasi dari pemerintah daerah
3.	Infrastruktur dasar inovasi	Infrastruktur yang mendukung inovasi	Infrastruktur dasar telah ada secara umum, namun infrastruktur khusus pendukung inovasi belum teridentifikasi
4.	Insentif untuk inovasi	Insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para aktor inovasi	Insentif belum termuat dalam regulasi legal formal dari pemerintah daerah

3.2. Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi Industri

Kondisi SIDA saat ini berdasarkan kelembagaan meliputi lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang ada di Kabupaten Wajo. Kelembagaan SIDA masih terbatas pada instansi pemerintah daerah yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. lembaga tersebut



juga belum mampu berfungsi optimal dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah. Adapun Bagian Organisasi Sekretariat Daerah hanya berfokus pada inovasi pelayanan publik. Sedangkan lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan perguruan tinggi dalam lingkup Kabupaten Wajo belum teridentifikasi.

Adapun daya dukung iptek mencakup seluruh sumber daya yang digunakan dalam iptek dan litbangyasa di Kabupaten Wajo. Sumber daya manusia penelitian, pengembangan dan rekayasa pada instansi pemerintah adalah mereka yang memiliki jabatan fungsional peneliti. Sedangkan di perguruan tinggi, para dosen memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian sesuai dengan tugas pokok berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini, Kabupaten Wajo telah memiliki seorang calon pejabat fungsional peneliti. Hal ini perlu mendapat perhatian agar segera diangkat dalam jabatan fungsional peneliti dan bersertifikasi Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti. Unit litbangyasa dari pihak swasta belum bisa teridentifikasi, sehingga perlu ditindaklanjuti agar pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dapat menjalin kerjasama dalam hal litbangyasa. Adapun dalam hal litbangyasa, pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi sektoral dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam pengembangan potensi unggulan daerah.

Kemampuan absorpsi industri khususnya UMKM mencakup seluruh kapasitas daya absorpsi industri, khususnya UMKM. Perkembangan inovasi produktif dalam perekonomian sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk menerapkan hasil-hasil dari penemuan teknologi baru. Kemampuan menerapkan teknologi ini ditentukan oleh daya absorpsi. Untuk itulah perlu usaha mendekatkan pelaku usaha, khususnya UMKM dengan teknologi baru melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM dikenal dengan istilah inkubasi bisnis yang dijalankan dalam wadah inkubator bisnis atau *innovation hub*. Akan tetapi Kabupaten Wajo masih belum memiliki wadah inkubator bisnis yang berperan penting dalam penguatan SIDA.



Tabel 3.3.
Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbangyasa
serta Kemampuan Absorpsi UMKM

No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1.	Kelembagaan litbangyasa	Seluruh lembaga litbangyasa di Kabupaten Wajo	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga litbangyasa hanya milik pemerintah daerah (Bappelitbangda), namun belum berfungsi optimal dalam menumbuh-kembangkan inovasi daerah b. Lembaga pengelola inovasi pelayanan publik di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo c. Lembaga litbangyasa di perguruan tinggi maupun swasta belum teridentifikasi d. Belum terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan swasta setempat
2.	Daya dukung iptek/ litbangyasa	Seluruh sumber daya iptek/ litbangyasa	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM litbangyasa pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) orang calon pejabat fungsional peneliti b. SDM pada perguruan tinggi dan swasta belum teridentifikasi c. Telah dilakukan kolaborasi litbangyasa dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam pengembangan potensi unggulan daerah
3.	Daya absorpsi UMKM	Seluruh upaya peningkatan daya absorpsi UMKM untuk memanfaatkan dan mengembangkan iptek	Belum tersedia wadah inkubator bisnis maupun <i>innovation hub</i> yang dapat menjadi cikal bakal dalam peningkatan daya absorpsi

3.3. Kolaborasi bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/Terbaik Hasil Litbangyasa serta Pelayanan Berbasis Teknologi

Kondisi SIDA saat ini berdasarkan kebijakan kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi di Kabupaten Wajo dapat dilihat dari kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan SIDA), dengan menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif. Kemitraan yang berfungsi sebagai jaringan sistem inovasi belum ada di Kabupaten Wajo. Namun pada konteks kemitraan



antar lembaga untuk program/ kegiatan rutin instansi pemerintah maupun pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Sehingga dengan adanya roadmap ini perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi model kemitraan strategis mendorong optimalisasi jaringan sistem inovasi daerah di Kabupaten Wajo.

Peningkatan difusi hasil-hasil inovasi dan upaya mendorong adanya replikasi inovasi sebagai alternatif lahirnya inovasi yang lebih memungkinkan dilakukan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Wajo. Tingkat difusi inovasi di antaranya tergambar dari modernisasi teknik produksi yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam penggunaan teknologi inovatif saat ini mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Berbagai teknologi inovatif telah dilakukan masyarakat dalam rangka mendongkrak ekonomi kreatif di masyarakat. Misalnya, saat ini sudah ada teknologi pabrik kelapa yang dapat mengeluarkan santan dari buah kelapa. Pada usaha pemotongan ayam juga telah menggunakan mesin perontok bulu ayam. Namun demikian, belum nampak teknologi inovatif belum dikomersilkan di Kabupaten Wajo. Masih banyak teknologi inovatif lainnya yang perlu didorong dihadirkan dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi daerah.

Pembangunan wahana interaksi pelaku inovasi perlu dilakukan agar penumbuhkembangan inovasi dapat berjalan optimal. Wahana atau wadah interaksi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam inovasi dapat dibentuk melalui adanya kawasan-kawasan strategis, seperti teknopolitan/ *technopark*, inkubator teknologi, inkubator bisnis, pusat informasi diseminasi dan alih teknologi hasil litbangyasa ataupun konsep lainnya. Dengan adanya wadah seperti ini, maka akan lebih memberikan arah bagi inovasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Wajo. Saat ini konsep mengenai *technopark* sudah direncanakan hadir sebagai pengembangan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Selatan di Danau Tempe. Kegiatan litbangyasa juga telah direncanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk *technopark* Danau Tempe. Namun demikian, belum ada kepastian waktu kapan rencana tersebut bisa diwujudkan, mengingat kondisi anggaran yang masih belum memungkinkan. Sehingga perlu dipikirkan alternatif strategi untuk melakukan percepatan pembangunan wahana tersebut di masa mendatang.

Pelayanan berbasis teknologi juga diperlukan dalam melihat kolaborasi dalam inovasi dan difusi inovasi, khususnya dalam pemberian layanan teknologi



untuk peningkatan kapasitas *adopter*. Konsep *e-government* sudah jamak dikenal di masyarakat. Pelayanan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Wajo pun sudah banyak menerapkan pelayanan berbasis *online system*, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Pemerintah daerah dan masyarakat sama memahami dengan hadirnya sistem *e-government* ini akan makin mendorong pelayanan yang makin baik, mudah, murah, transparan, serta akuntabel dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya di masa mendatang, model pelayanan berbasis informasi teknologi dan *online system* perlu terus dikembangkan melalui inovasi agar peran SIDA menjadi lebih strategis dalam konteks pengembangan model *e-government* di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.4
Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi,
Praktik Baik/ Terbaik Hasil Litbangyasa Serta Pelayanan Berbasis
Teknologi

No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1.	Kemitraan strategis dan kolaborasi untuk inovasi	Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkembangkan program strategis dan inovatif	a. Belum terjalin kemitraan yang berfungsi secara khusus sebagai jaringan inovasi di Kabupaten Wajo b. Model kemitraan yang biasa dilakukan dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan rutin pemerintah maupun pemerintah daerah masih bersifat sektoral.
2.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil-hasilinovasi	Belum nampak terjadi difusi inovasi yang kemudian diterapkan di masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan/ mendorong kegiatan ekonomi kreatif daerah
3.	Pembangunan wahana interaksipelaku inovasi	Wahana atau wadah untuk memperlancar interaksi antara pelaku inovasi	Belum ada wahana interaksi antar pelaku inovasi, baik berupa inkubator teknologi, inkubator bisnis, <i>technopark</i> ataupun pusat informasi diseminasi dan alit teknologi hasil litbangyasa
4.	Pelayanan berbasis teknologi	Segala jenis pelayanan berbasis teknologi yang diberikan kepada masyarakat	Berkembangnya penggunaan aplikasi berbasis teknologi dan online di lingkungan pemerintah daerah dalam pelayanan publik

3.4. Budaya Inovasi

Kondisi SIDA di Kabupaten Wajo berdasarkan budaya inovasi dapat dilihat melalui penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi.



Indikator tersebut untuk melihat sejauhmana kondisi budaya inovasi yang telah dicapai melalui jalur pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, inovasi, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan telah dilakukan melalui UPT Balai Latihan Kerja. Program dan pelatihan berbasis potensi daerah juga telah terselenggarakan akan tapi tidak dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Wajo juga telah meresmikan Laboratorium Inovasi Daerah pada akhir tahun 2018 yang lalu. Akan tetapi pada tahun 2019, kegiatan tersebut tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. Padahal Laboratorium Inovasi Daerah dapat menjadi wadah atau wahana untuk menumbuh-kembangkan budaya inovasi di Kabupaten Wajo, baik melalui pengembangan model pembelajaran inovasi. Demikian pula dengan pola membiasakan inovasi sebagai bagian dari gaya hidup aparat pemerintah daerah masih belum nampak.

Pembangunan daerah seharusnya diarahkan pada penguatan potensi lokal yang menjadi pendukung utama pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Masih belum optimalnya penguatan budaya inovasi dalam lingkungan pemerintah daerah menyebabkan daya saing daerah Kabupaten Wajo masih rendah dan kohesi sosial masyarakat belum terbentuk secara optimal. Kohesi sosial yang dimaksud adalah sejauhmana inventarisasi, dokumentasi, dan sosialisasi teknologi dan inovasi kepada masyarakat serta komponen lainnya di Kabupaten Wajo. Berdasarkan fakta yang ada, inovasi belum menjadi tema utama bagi masyarakat karena budaya inovasi belum menjadi budaya kerja dalam lingkungan pemerintah daerah. Sehingga masih perlu waktu untuk bisa mendorong terjadinya kohesi sosial terkait dengan pengenalan pentingnya inovasi di masyarakat Kabupaten Wajo.

Hal lain dalam melihat kondisi SIDA di Kabupaten Wajo adalah apresiasi dan kampanye inovasi, yaitu sejauhmana daerah telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus berkampanye tentang pentingnya budaya kerja inovatif di wilayahnya. Sudah banyak OPD yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan diganjar dengan apresiasi baik ditingkat daerah maupun nasional. Namun demikian, perlu dipikirkan model apresiasi yang mampu memotivasi sumber daya aparatur daerah serta meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan daerah.



Selain itu, kondisi SIDA di Kabupaten Wajo dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif dan pemberian insentif yang diperlukan oleh para wirausahawan agar kinerja usahanya semakin baik. Jumlah usaha baru bertumbuh banyak, namun dalam jangka waktu tertentu gulung tikar atau tidak lagi melanjutkan usahanya. Hal ini karena masih belum optimalnya pendampingan *triple helix* terhadap usaha masyarakat, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dan berfokus pada pengembangan usaha yang lebih kreatif dan inovatif. Bantuan teknis, insentif, maupun pendampingan bagi pelaku usaha perlu dibuatkan peta jalan yang jelas agar bisa jumlah pelaku usaha yang kreatif dan inovatif di Kabupaten Wajo dapat semakin meningkat.

Tabel 3.5
Pengembangan Budaya Inovasi

No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1.	Penguatan budaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan	Upaya untuk mendorong budaya inovasi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal dalam rangka peningkatan kewirausahawan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat UPT Balai Latihan Kerja yang menyelenggarakan program dan pelatihan tertentu b. Telah terselenggara program dan pelatihan berbasis potensi daerah tapi tidak dilakukan secara berkelanjutan c. Laboratorium Inovasi Daerah telah terbentuk namun tidak berkelanjutan d. Belum tersedia model atau kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kreatifitas dan inovasi e. Belum tersedia pusat pembelajaran masyarakat berbasis kegiatan inovatif dan kreatif
2.	Penguatan kohesi sosial	Upaya dalam mengelola teknologi masyarakat sebagai sumber inovasi dan mendorong peran serta masyarakat	Belum teridentifikasi teknologi inovasi masyarakat berdasarkan karakteristik daerah dan kearifan lokal
3.	Apresiasi dan kampanye inovasi	Penghargaan terhadap karya yang inovatif dan upaya membangun budaya inovasi melalui kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum terbangun budaya inovasi di Kabupaten Wajo, baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat b. Pemerintah daerah belum memberikan apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif atau inovator



No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
4.	Penumbuhan usaha baru yang inovatif	Upaya dalam mendorong peningkatan jumlah usaha baru yang inovatif	Belum optimalnya pendampingan <i>triple helix</i> terhadap usaha masyarakat

3.5. Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri Daerah dan Nasional

Kondisi SIDA di Kabupaten Wajo berdasarkan keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional yang telah dicapai dapat dilihat dari prakarsa klaster industri spesifik daerah serta prakarsa sistem inovasi. Prakarsa ini merupakan perkembangan aktor bisnis dan non-bisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri. Kekuatan inovasi bisa dilihat dari para pelaku usaha yang kreatif dan inovatif sebagai ujung tombak dari kegiatan inovasi daerah.

Klaster industri yang ada di Kabupaten Wajo terbagi menjadi tiga, yaitu: kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa PKL, PKLp dan PPK. Selanjutnya terdapat kawasan peruntukan industri sedang berupa kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera. Untuk kawasan peruntukan industri besar terdiri atas industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi, serta adanya rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel dan batu bata. Akan tetapi belum ada *legal drafting* dalam pengembangan klaster industri prioritas daerah, khususnya klaster berbasis potensi unggulan daerah yang memprioritaskan kreatifitas dan inovasi sebagai basis usahanya.

Potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Wajo begitu besar. Pemerintah daerah tentu tidak dapat melakukan pengembangan industri khususnya dalam kebijakan inovasi di Kabupaten Wajo tanpa kerjasama antardaerah dan pusat. Saat ini Kabupaten Wajo mulai mengimplementasikan mekanisme koordinasi kebijakan daerah secara lebih terbuka dengan daerah lain atau pemerintah, agar dapat memacu sistem inovasi dan klaster industri di daerah. Koordinasi dan kerjasama tersebut perlu dioptimalkan.

Adapun pengembangan/penguatan kelembagaan khusus menggambarkan sejauhmana terbangunnya suatu lembaga yang khusus menangani percepatan proses terjadinya kolaborasi inovasi. Adanya klaster industri merupakan pintu masuk pengembangan kegiatan lain yang inovatif sehingga mendorong



produktifitas dan bisa diandalkan oleh daerah karena sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Wajo sendiri. Apalagi dengan perkembangan industri 4.0 yang berbasis pada *internet of thing* (IoT) agar memiliki daya saing. Dengan demikian perlu adanya kelompok kerja yang dapat membantu penyusunan konsep model dan mengawal implementasi kluster industri yang lebih kreatif dan inovatif di Kabupaten Wajo.

Tabel 3.6
Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan
Kluster Industri Daerah dan Nasional

No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1.	Prakarsa kluster industri unggulan daerah dan/ atau prakarsa sistem inovasi	Berkembangnya aktor bisnis dan non bisnis dalam jaringan kluster industri unggulan daerah	a. Belum adanya <i>legal drafting</i> bagi pengembangan kluster industri prioritas daerah b. Belum ada model kluster industri yang bertumpu pada industri kreatif dan inovatif c. Masih rendahnya kemampuan dalam pengelolaan kluster industri
2.	Koordinasi kebijakan daerah dan daerah dengan nasional	Adanya koordinasi kebijakan antar daerah dan atau daerah dengan pemerintah pusat yang dapat memicu dan memacu inovasi	Koordinasi horizontal dan vertikal antar daerah dan lembaga masih belum optimal, meskipun telah terbangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terakreditasi
3.	Pengembangan/ penguatan kelembagaan khusus kluster industri yang berbasis inovasi	Terbentuknya lembaga khusus untuk mengembangkan kluster industri yang berbasis pada inovasi	Belum terbentuk lembaga atau wadah yang secara intens dan khusus menangani lahirnya industri yang berbasis inovasi

3.6. Keselarasan dengan Perkembangan Global

Kondisi SIDA di Kabupaten Wajo berdasarkan keselarasan dengan perkembangan global yang telah dilaksanakan di daerah dapat dilihat dari sejauhmana prakarsa dan respon pemerintah daerah terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan. Isu yang dihadapi terkait dengan lingkungan di tingkat global adalah soal pemanasan global, perubahan iklim dan bencana alam. Kerusakan lingkungan akibat limbah plastik juga dihadapi di Kabupaten Wajo. Setiap pihak di lingkup Kabupaten Wajo memiliki peran dalam menjaga lingkungan dengan berpartisipasi secara aktif dalam implementasi program/ kegiatan yang berdampak pada pelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten



Wajo telah berupaya mendorong budaya hidup bersih di masyarakat melalui Gerakan Wajo Mapaccing, termasuk dalam pemilahan sampah. Juga telah tersedia regulasi daerah mengenai himbauan untuk tidak menggunakan kantong kresek dalam rangka mengurangi sampah plastik. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas serta menambah sarana prasarana lainnya. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa ikut serta menjaga lingkungan juga masih perlu ditingkatkan lagi.

Keselarasan dengan perkembangan global juga dapat dilihat dari ketersediaan penerapan standar terhadap kualitas produk-produk yang dihasilkan. Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Dengan adanya standardisasi, salah satu manfaat yang diperoleh adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Akan tetapi, Kabupaten Wajo belum menyediakan standar kualitas dalam produk industri, sehingga belum mampu menjamin kualitas dan keamanan produk secara nasional dan internasional. Padahal dengan standarisasi dan sertifikasi produk, Kabupaten Wajo dapat bersaing dalam memasuki pasar domestik maupun internasional.

Setelah standardisasi, kondisi SIDA di Kabupaten Wajo dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah memberikan jaminan dan mendorong pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peran lembaga kelitbang dalam mengelola HKI juga belum optimal. Produk khas daerah maupun hasil-hal inovasi perlu diberikan perlindungan dengan tetap membedakan antara produk yang paten dan dapat direplikasi. Hingga saat ini, belum teridentifikasi produk daerah atau produk inovasi yang telah didaftarkan hak ciptanya sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan.

Kondisi SIDA di Kabupaten Wajo juga berkaitan dengan perhatian daerah terhadap aspek perburuhan. Penggunaan buruh dalam lapangan pekerjaan di klaster-klaster industri yang ada harus memiliki kelayakan hidup di sesuai dengan peraturan perundangan. Hingga saat ini tidak ada permasalahan yang muncul akibat adanya masalah perburuhan di Kabupaten Wajo, sehingga dapat diasumsikan bahwa masalah buruh dan upah buruh di Kabupaten Wajo telah sesuai dengan standar kelayakan hidup. Namun demikian, pemerintah daerah



tetap perlu mengantisipasi munculnya jenis industri kreatif dan inovatif tentu akan memberikan tantangan baru dalam aspek perburuhan.

Tabel 3.7
Keselarasn dengan Perkembangan Global

No.	Variabel	Definisi	Kondisi Saat Ini
1.	Lingkungan	Prakarsa dan respon program lingkungan	a. Adanya Gerakan Wajo Mapaccing b. Sosialisasi pemilahan sampah c. Tersedia regulasi daerah mengenai pengurangan sampah plastik
2.	Standardisasi	Upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha	Belum tersedia standar kualitas produk
3.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Fasilitasi kepada masyarakat mengenai HKI	a. Belum terbentuk kelembagaan pengelola HKI b. Produk khas daerah dan hasil inovasi belum mendapatkan HKI
4.	Ketenagakerjaan	Penggunaan tenaga kerja terkait dengan kegiatan industri berbasis inovasi	Belum ada kebijakan mengenai ketenagakerjaan/perburuhan daerah



BAB IV
TANTANGAN DAN PELUANG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Berdasarkan temuan dan informasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan strategis mengenai sistem inovasi di Kabupaten Wajo berdasarkan kerangka kebijakan penguatan SIDA.

Tabel 4.1
Permasalahan Strategis Sistem Inovasi di Kabupaten Wajo

NO.	KERANGKA KEBIJAKAN	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem basis data inovasi yang belum terbangun b. Belum tersedia regulasi terkait penguatan dan pengembangan inovasi c. Infrastruktur dasar, sarana dan prasarana belum mampu mendukung tumbuh kembang inovasi d. Apresiasi dan insentif bagi inovator belum dijamin dalam sebuah regulasi daerah
2.	Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Alur komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi inovasi belum terarah b. Jumlah aktor litbangyasa masih minim dan kualitas rendah c. Belum tersedia wadah yang mampu memfasilitasi lahirnya produk-produk kreatif dan inovatif yang berkualitas dan berdaya saing
3	Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih lemahnya pola kemitraan dalam memperluas jaringan inovasi b. <i>Triple helix</i> belum berperan secara optimal dalam mendorong difusi inovasi c. Model kolaborasi, sinergi dan koordinasi dalam penguatan inovasi dan difusi inovasi belum terbangun secara sistemik
4	Pengembangan budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum dan arah kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku inovasi belum optimal b. Sosialisasi dan kampanye inovasi tidak dilakukan secara masif c. Belum terbangun budaya inovasi yang kuat di kalangan pemerintah daerah dan juga masyarakat
5	Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional	Belum terlihat klaster industri yang berbasis inovasi sebagai adaptasi dalam era industri 4.0 berbasis teknologi dan internet



NO.	KERANGKA KEBIJAKAN	PERMASALAHAN STRATEGIS
6	Keselarasan dengan perkembangan global	Isu mengenai lingkungan belum terinisiasi melalui program dan kegiatan yang lebih kreatif dan inovatif

Permasalahan yang tersebar di setiap pilar kerangka kebijakan inovasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan berawal dari belum terbangunnya sebuah sistem yang tertata dengan baik. Perlu adanya peta jalan atau *roadmap* agar segala permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal penguatan inovasi daerah dapat memiliki solusi melalui kebijakan inovasi. Berjalannya sebuah sistem memerlukan suatu keorganisasian atau wadah fungsional penggerak yang berisi suatu tim inovasi daerah beserta berbagai sumberdayanya. Wadah ini berfungsi merancang pola inovasi daerah secara detail, menjadi pusat kolaborasi semua komponen inovasi yang terdiri dari *academician, businessmen, government* dan *community* (ABGC). Wadah ini pun dapat mengawal berjalannya sistem inovasi untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif, dengan menyusun dan mengharmonisasikan konsep inovasi dengan berbagai kebijakan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh sistem dapat berjalan secara terarah dan menyeluruh melalui program dan kegiatan yang saling terintegrasi.

Sistem inovasi yang terintegrasi dengan dokumen kebijakan daerah lainnya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya para pelaku usaha serta industri yang inovatif dengan berbagai produk-produk yang tentu saja juga kreatif dan inovatif. Kondisi SIDA menjadi kondusif jika dapat tercipta produk-produk inovatif melalui adanya implementasi inovasi di dunia usaha. Harapannya adalah berbagai produk yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Wajo. Produk tersebut juga dapat menjadi produk unggulan yang berkontribusi dalam peningkatan daya saing daerah, sehingga mampu bersaing di kancah regional, nasional, bahkan internasional.

Dalam menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menumbuhkan inovasi daerah, maka disajikan tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh SIDA saat ini dan di masa mendatang.



Tabel 4.2
Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA

TANTANGAN	PELUANG
Penguatan Unsur-Unsur Kelembagaan SIDA	
Belum kuatnya pengorganisasian berbagai aktivitas inovasi	Visi dan komitmen dalam mendukung sistem inovasi telah terbangun
Belum terbangunnya sistem data inovasi	Pembangunan sistem <i>e-government</i> memungkinkan adanya kolaborasi bagi ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan inovasi
Masih belum terarahnya dukungan regulasi dan insentif	Meningkatnya komitmen meningkatkan daya saing daerah dapat mendorong inovasi sebagai prioritas
Masih lemahnya budaya kerja inovatif di lingkungan lembaga pemerintahan, kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha	Mulai tumbuhnya para perintis inovasi di perangkat daerah dan eksistensi kearifan masyarakat dalam pengelolaan komoditi yang potensial sebagai penggerak ekonomi
Masih lemahnya kerjasama dan koordinasi antar <i>stakeholders</i>	Kekuatan pemerintah selaku dinamisor semakin penting artinya di era desentralisasi
Alih iptek masih berjalan sporadis dan belum terpolakan	Terbentuknya SIDA berbasis riset/ilmiah
Belum terbangunnya budaya inovasi sejak dini di masyarakat	Pengenalan budaya inovatif melalui muatan lokal dalam kurikulum sekolah menengah
Problem ketersediaan SDM (teknopreneur) yang mampu mengelola berbagai kegiatan inovasi menuju lahirnya produk inovatif (berdayasaing)	Munculnya para pelopor inovasi di berbagai bidang kegiatan yang potensial dikembangkan sebagai teknopreneur
Belum terintegrasinya secara optimal issue aktual dan standardisasi global ke dalam desain daya saing daerah	Semakin tingginya komitmen mendorong daya saing daerah dapat mewujudkan kesadaran global
Penguatan Sistem Kluster Industri /UKM yang Inovatif	
Belum optimalnya pengembangan kluster industri produk unggulan daerah	Adanya komitmen kepala daerah untuk membangun dan mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD)
Masih rendahnya kapasitas absorpsi inovasi pada masyarakat	Pemanfaatan berbagai unsur dalam mendorong absorpsi inovasi dikarenakan pendekatan kolaboratif dalam pembangunan daerah sudah terbentuk meski belum terarah
Wahana interaksi dan layanan teknologi belum terpola dengan baik bagi pendayagunaan HKI, pemanfaatan informasi, pengetahuan dan teknologi	Memungkinkan bagi terakomodasinya teknologi bagi kepentingan daya saing daerah



BAB V

KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI

Berdasarkan analisis terhadap kondisi inovasi dan analisis terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, maka ada beberapa hal yang akan dicapai sebagai bentuk penguatan inovasi daerah.

Pertama, terbangunnya kerangka umum yang kondusif bagi inovasi di Kabupaten Wajo. Hal ini ditandai dengan terbangunnya sistem basis data inovasi yang baik dan adanya regulasi yang berorientasi dan memberikan dukungan pada penguatan serta pengembangan inovasi. Selain itu, tersedianya infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah serta adanya insentif yang memadai bagi para inovator yang terjamin dalam satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah menjadi pendorong dalam penguatan inovasi.

Kedua, terbangunnya kelembagaan dan daya dukung litbangyasa yang memiliki alur komunikasi, koordinasi, kerjasama, serta kolaborasi yang baik, melalui peningkatan jumlah pelaku litbangyasa juga menjadi hal selanjutnya yang ingin dicapai sekaligus memberikan kesempatan para aktor litbangyasa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya dalam mendukung penguatan SIDA. Selain itu perlunya sebuah wadah untuk melakukan inkubasi inovasi yang akan menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif yang berkualitas dan memiliki daya absorpsi yang tinggi di masyarakat sehingga dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian daerah secara cepat dan tepat.

Kondisi ketiga yang akan dicapai adalah terbangunnya sistem difusi teknologi yang sistematis. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemitraan yang berfungsi memperluas jaringan inovasi dalam rangka penguatan SIDA di Kabupaten Wajo. Selain itu, terbangunnya kolaborasi antara unsur *triple helix* melalui kemitraan dalam rangka mendorong kegiatan difusi inovasi yang merata di daerah.

Hal keempat yang akan dicapai adalah berkembangnya budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku inovasi di daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya dukungan kurikulum dan arah kebijakan berbasis pendidikan kreatif dan inovatif. Budaya inovasi juga ditandai dengan adanya peningkatan usaha dari pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi



dan kampanye budaya inovasi agar masyarakat semakin akrab dengan istilah inovasi dan perilaku berinovasi. Indikator budaya inovasi ini berjalan dengan baik adalah banyak munculnya para pelaku usaha dengan basis usaha kreatif dan inovatif yang kemudian menjadi unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.

Kondisi kelima yang akan dicapai adalah hadirnya klaster industri yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif, sebagai bentuk penguatan terhadap bertumbuhnya industri yang berbasis inovasi. Sedangkan kondisi keenam adalah terbentuknya regulasi yang dapat memberikan penguatan terhadap sistem inovasi yang responsif dan adaptif serta berdaya saing global. Dengan hadirnya regulasi tersebut, berbagai program dan kegiatan turunan yang menghasilkan kreatifitas dan inovasi dapat berjalan secara terintegrasi, dengan tetap memperhatikan trend global yang ada saat ini. Berbagai inovasi yang dihasilkan juga perlu dilindungi dengan paten dan juga didorong untuk bisa direplikasi demi kebutuhan pembangunan inovasi daerah

Tabel 5.1
Kondisi SIDA yang akan Dicapai

KERANGKA KEBIJAKAN	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi daerah	Terbangunnya sistem basis data inovasi
	Adanya regulasi yang berorientasi dan memberikan dukungan pada penguatan serta pengembangan inovasi
	Tersedianya infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah
	Adanya insentif yang memadai bagi para inovator yang terjamin dalam satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah
Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Meningkatnya jumlah pelaku litbangyasa
	Tersedianya kesempatan para aktor litbangyasa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas
	Tersedia wadah untuk melakukan inkubasi inovasi yang akan menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif yang berkualitas dan memiliki daya absorpsi yang tinggi di masyarakat
Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Meningkatnya kemitraan yang berfungsi memperluas jaringan inovasi
	Terbangunnya kolaborasi antara unsur <i>triple helix</i> melalui kemitraan
Pengembangan budaya inovasi	Adanya dukungan kurikulum dan arah kebijakan berbasis pendidikan kreatif dan inovatif



KERANGKA KEBIJAKAN	KONDISI YANG INGIN DICAPAI
	Adanya peningkatan usaha dari pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan kampanye budaya inovasi Meningkatnya jumlah pelaku usaha dengan basis usaha kreatif dan inovatif
Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional	Hadirnya klaster industri yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif
Keselarasan dengan perkembangan global	Terbentuknya regulasi yang dapat memberikan penguatan terhadap sistem inovasi yang responsif dan adaptif serta berdaya saing global



BAB VI

TUJUAN DAN SASARAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Persaingan dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan semakin lama semakin ketat. Setiap daerah termasuk Kabupaten Wajo dituntut memiliki keunggulan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing daerah. Keunggulan hanya bisa dicapai dengan adanya kreatifitas dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal di Kabupaten Wajo. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah agar dapat menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi.

Berdasarkan analisis mengenai tantangan dan isu-isu strategis SIDA di Kabupaten Wajo, maka tujuan penguatan SIDA adalah :

1. Mendorong penguatan kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA; dan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan SIDA adalah:

1. Terciptanya kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA; dan
2. Terciptanya pelaku usaha berbasis pada industri kreatif dan inovatif.



BAB VII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Berdasarkan tujuan dan sasaran penguatan SIDA Kabupaten Wajo yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu menyusun strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Strategi dan arah kebijakan yang tepat dapat memastikan usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

7.1. Strategi Penguatan SIDA

Agar strategi penguatan SIDA selaras dengan kebijakan daerah, maka perlu menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. Visi Pemerintah Kabupaten Wajo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 adalah Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) Misi yang selanjutnya menjadi pembanding agar dapat sejalan dengan strategis penguatan SIDA Kabupaten Wajo. Dari keempat misi tersebut, maka misi yang terkait dengan penguatan SIDA diuraikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Strategi Penguatan SIDA berdasarkan Misi Kabupaten Wajo
Tahun 2019-2024

MISI KABUPATEN WAJO	STRATEGI PENGUATAN SIDA
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	1. Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA 2. Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM 3. Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA
2. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	4. Peningkatan inisiasi program/kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	5. Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antarpelaku inovasi 6. Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis



MISI KABUPATEN WAJO	STRATEGI PENGUATAN SIDA
	kolaborasi antarinststitusi dan partisipasi aktif masyarakat 7. Penguatan pilar-pilar penumbuh-kembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan untuk percepatan peningkatan perekonomian daerah

Strategi penguatan SIDA Kabupaten Wajo berdasarkan misi daerah secara umum terdiri dari 7 (tujuh) strategi yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA menjadi momentum penguatan SIDA Kabupaten Wajo. Adanya berbagai aturan yang mendukung dapat memberikan kepastian secara hukum terhadap seluruh aktivitas SIDA yang akan dilaksanakan. Dengan penguatan regulasi, para pemangku kebijakan dan seluruh aktor inovasi dapat menjalankan tugas, fungsi, serta kontribusi sesuai kewenangannya dalam penguatan SIDA. Dalam upaya penguatan regulasi tersebut juga disusun model insentif yang akan diberikan sebagai stimulus kepada para aktor inovasi. Penentuan insentif diperlukan agar para aktor inovasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendorong perubahan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi penopang daya saing daerah.
2. Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM
3. Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA
4. Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta para wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan/atau mengembangkan wahana interaksi antar pelaku inovasi. Kuantitas dan kualitas para aktor inovasi dan para wirausaha baru yang bekerja dalam lingkungan kreatif dan inovatif perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. SIDA secara bertahap harus mampu memberikan upaya konkrit peningkatan para aktor inovasi dan para wirausaha kreatif dan inovatif dalam kurun waktu tertentu. SIDA juga harus menyediakan wadah interaksi bagi para antaraktor inovasi yang menjadi wahana lahirnya ide inovasi, inkubasi, dan diseminasi dan sosialisasi.



5. Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat. SIDA tidak dapat berjalan sendiri dan tidak akan berhasil tanpa kerja keras semua pihak. Sehingga setelah semua konsep dan rencana dibuat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye yang relevan kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Pengembangan dan penguatan jaringan kerja SIDA jelas menjadi aktor utama yang bisa menginformasikan secara intens mengenai SIDA, sehingga hubungan antaraktor di dalam jaringan SIDA harus baik agar bisa memberikan sosialisasi, kampanye, ataupun pendampingan kepada masyarakat secara lebih cepat dan tepat.
6. Peningkatan inisiasi program/kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan kondisi yang terjadi sangat cepat dan fundamental mengharuskan pemerintah daerah memikirkan kembali proses bisnisnya, agar kebijakan pembangunan dapat berkelanjutan. Program dan kegiatan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.
7. Penguatan pilar-pilar penumbuh-kembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan untuk percepatan peningkatan perekonomian daerah. Sektor unggulan daerah dapat mendorong dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap sektor-sektor unggulan di Kabupaten Wajo. SIDA perlu dimasukkan dalam rencana pengembangan sektor unggulan dengan cara menciptakan berbagai program/kegiatan serta aktivitas pemerintah daerah yang dapat memacu tumbuhnya kreatifitas dan inovasi di kalangan para pelaku di sektor unggulan tersebut

7.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Penentuan arah kebijakan SIDA Kabupaten Wajo dilakukan melalui analisis SWOT terhadap kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Permasalahan internal diuraikan menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*),



sedangkan permasalahan eksternal diuraikan menjadi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi internal pemerintah Kabupaten Wajo, maka diuraikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strength*)
 - a. Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA
 - b. Hadirnya perangkat daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan
 - c. Karya inovasi pelayanan publik yang telah ada dan berhasil dalam kompetisi
 - d. Payung hukum penguatan SIDA dari pemerintah
2. Kelemahan (*weakness*)
 - a. Anggaran daerah yang menurun akibat lesunya perekonomian daerah
 - b. Infrastruktur dasar, sarana dan prasarana daerah yang belum memadai
 - c. Budaya inovasi di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat belum terbangun
 - d. Keberlanjutan inovasi yang belum terukur
 - e. Kolaborasi antar OPD masih lemah

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi eksternal pemerintah Kabupaten Wajo, maka diuraikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peluang (*opportunity*)
 - a. Era keterbukaan informasi dan penguasaan teknologi oleh masyarakat
 - b. Kontribusi dari sektor industri, perdagangan, jasa serta transportasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
 - c. Pola kerjasama dan kemitraan lokal, regional dan nasional
 - d. Bonus demografi dari kalangan generasi milenial dan gen Z yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi
2. Ancaman (*threat*)
 - a. Era disrupsi dan industri 4.0
 - b. Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang cepat sebagai respon terhadap VUCA: *volatility* (kondisi yang tidak stabil), *uncertainty* (tidak pasti), *complexity* (kompleksitas), dan *ambiguity* (ambiguitas)
 - c. Bencana alam dan non alam
 - d. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan



Tabel 7.2
Hasil Analisis SWOT terhadap Penguatan SIDA Kabupaten Wajo

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan daerah dalam membangun SIDA 2. Hadirnya perangkat daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan 3. Karya inovasi pelayanan publik yang telah ada dan berhasil dalam kompetisi 4. Payung hukum penguatan SIDA dari pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran daerah yang menurun akibat lesunya perekonomian daerah 2. Infrastruktur dasar, sarana dan prasarana daerah yang belum memadai 3. Budaya inovasi di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat belum terbangun 4. Keberlanjutan inovasi yang belum terukur 5. Kolaborasi antar OPD masih lemah
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Era keterbukaan informasi dan penguasaan teknologi oleh masyarakat 2. Kontribusi dari sektor industri, perdagangan, jasa serta transportasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi 3. Pola kerjasama dan kemitraan lokal, regional dan nasional 4. Bonus demografi dari kalangan generasi milenial dan gen Z yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Era disrupsi dan industri 4.0 2. Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang cepat sebagai respon terhadap VUCA 3. Bencana alam dan non alam 4. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan

Dari hasil analisis SWOT terhadap kondisi Pemerintah Kabupaten Wajo baik secara internal maupun eksternal, maka pemerintah daerah dapat membuat keunggulan dengan mendorong peluang yang ada sebagai acuan dalam membuat kebijakan, dan mengutamakan kegiatan untuk mengurangi/menghilangkan kelemahan yang dimiliki. Dengan demikian arah kebijakan SIDA saat ini adalah menggunakan sebaik mungkin kekuatan yang dimiliki dengan terus mendorong potensi unggulan daerah pada sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, arah kebijakan SIDA harus mulai mendorong OPD agar meningkatkan kolaborasi lintas unit, agar seluruh komponen SIDA dapat bergerak sinergis dan optimal.



Tabel 7.3
Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Wajo

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA	1. Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah
2. Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM	2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan SIDA
3. Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA	3. Mengembangkan kapasitas dan mengintegrasikan sistem informasi untuk pengembangan inovasi daerah
4. Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan	4. Membangun model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo
	5. Memperkuat program dan kegiatan kreatif dan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan
	6. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan
5. Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antar-pelaku inovasi	7. Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif serta berkontribusi ke dalam sektor unggulan daerah
	8. Mengembangkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya
6. Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat	9. Memperkuat jaringan inovasi antar institusi
	10. Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa
	11. Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas
7. Penguatan pilar-pilar penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan untuk percepatan peningkatan perekonomian daerah	14. Memperkuat kebijakan bagi sektor unggulan daerah yang berdaya saing
	15. Membangun iklim investasi yang mampu mendorong sektor unggulan daerah yang lebih variatif, kreatif dan inovatif



BAB VIII
FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

8.1. Fokus Penguatan SIDA

Fokus penguatan SIDA Kabupaten Wajo diidentifikasi berdasarkan arah kebijakan dalam penguatan SIDA sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Fokus Penguatan SIDA

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1. Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA	1. Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah	1. Pengembangan basis data inovasi yang mendorong percepatan, penguatan, dan pengembangan SIDA 2. Pengembangan model insentif untuk para pelaku inovasi daerah
2. Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM	2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan SIDA	1. Peningkatan kesempatan mendapatkan diklat klasikal dan non klasikal 2. Peningkatan kesempatan untuk magang di sektor swasta maupun BUMN yang telah terbukti sebagai organisasi kreatif dan inovatif
3. Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA	3. Mengembangkan kapasitas dan mengintegrasikan sistem informasi untuk pengembangan inovasi daerah	Optimalisasi integrasi sistem informasi yang ada pada perangkat daerah
4. Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan	4. Membangun model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo	1. Peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar unit yang terkait dengan SIDA melalui forum formal dan informal 2. Penyusunan model komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi lintas unit pada OPD di



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo
	5. Memperkuat program dan kegiatan kreatif dan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan inisiasi pembahasan program dan kegiatan kreatif dan inovatif oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo 2. Peningkatan program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang masuk dan menjadi kebijakan daerah
	6. Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan prioritas pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan 2. Peningkatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan
5. Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antar-pelaku inovasi	7. Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif serta berkontribusi ke dalam sektor unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan basis data, informasi dan identifikasi para pelaku inovasi dan wirausaha yang ada saat ini 2. Pengembangan model peningkatan kapasitas bagi pelaku inovasi dan para wirausaha agar semakin kreatif dan inovatif 3. Peningkatan jumlah pelaku inovasi dan wirausaha baru
	8. Mengembangkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan identifikasi model pengembangan dan wahana interaksi bagi para pelaku inovasi 2. Penguatan wahana yang terbentuk agar memudahkan interaksi antar pelaku inovasi dengan pemangku kepentingan lainnya



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
<p>6. Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antarinststitusi dan partisipasi aktif masyarakat</p>	<p>9. Memperkuat jaringan inovasi antar institusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan basis data identifikasi jaringan inovasi yang memungkinkan untuk diajukan kerjasama dan kolaborasi 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan dalam jaringan inovasi antarinststitusi
	<p>10. Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan model yang mendorong percepatan terjadinya difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas terjadinya difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa
	<p>11. Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas 2. Pengembangan model budaya inovasi untuk penguatan SIDA
<p>7. Penguatan pilar-pilar penumbuhan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan untuk percepatan peningkatan perekonomian daerah</p>	<p>12. Memperkuat kebijakan bagi sektor unggulan daerah yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas pembahasan kebijakan sektor unggulan daerah yang lebih kreatif dan inovatif antar pemangku kepentingan dan juga instansi pemerintah daerah 2. Penentuan indikator keberhasilan kebijakan sektor unggulan yaitu industri, perdagangan dan jasa yang berbasis pada kreatifitas dan inovasi



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
	13. Membangun iklim investasi yang mampu mendorong sektor unggulan daerah yang lebih variatif, kreatif dan inovatif	1. Pengidentifikasian potensi investasi yang bisa masuk dari sektor unggulan yang lebih kreatif dan inovatif 2. Peningkatan jumlah investasi yang masuk pada sektor unggulan yang kreatif dan inovatif

8.2. Program Prioritas Penguatan SIDA

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan dan memperhatikan fokus penguatan SIDA di Kabupaten Wajo, maka disusun program prioritas yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dalam melakukan penguatan inovasi daerah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.2.



Tabel 8.2
Program Prioritas Penguatan SIDA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI SEKARANG	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM PRIORITAS
Mendorong penguatan kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA (T.1)	Terciptanya kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA (S.1)	Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA	Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah	Terdapat regulasi terkait inovasi dari pemerintah, namun belum tersedia kebijakan mengenai inovasi dari pemerintah daerah	Adanya regulasi yang berorientasi dan memberikan dukungan pada penguatan serta pengembangan inovasi	Program penelitian dan pengembangan
		Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan SIDA	Kuantitas dan kualitas SDM litbangyasa dan inovasi daerah masih sangat rendah	Meningkatnya jumlah SDM litbangyasa dan inovasi daerah yang unggul	Program pengembangan sumber daya manusia
		Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA	Mengembangkan kapasitas dan mengintegrasikan sistem informasi untuk pengembangan inovasi daerah	Terdapat beberapa sistem informasi yang terkait dengan inovasi daerah	Sistem informasi yang menunjang pengembangan SIDA	1. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 2. Program penelitian dan pengembangan
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah (T.2)	Terciptanya pelaku usaha berbasis pada industri	Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja	Membangun model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan	Belum ada wadah inovasi daerah lingkup Pemerintah Daerah	Terbangunnya komunikasi, koordinasi antarperangkat daerah dalam penguatan SIDA	Program Penelitian dan Pengembangan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI SEKARANG	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM PRIORITAS
	katif dan inovatif (S.2)	SIDa untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Wajo			
			Memperkuat program dan kegiatan kreatif dan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	Program dan kegiatan kreatif dan inovatif belum menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan	Tersedia program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang mampu mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	Infrastruktur dasar telah ada secara umum, namun infrastruktur khusus pendukung inovasi belum teridentifikasi	Tersedianya infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral
		Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antar-pelaku inovasi	Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif serta berkontribusi ke dalam sektor unggulan daerah	Terdapat UPT Balai Latihan Kerja yang menyelenggarakan program dan pelatihan tertentu untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, namun belum berbasis potensi daerah serta inovasi dan kreativitas	Tersedianya dukungan kurikulum dan arah kebijakan peningkatan kapasitas pelaku inovasi berbasis pendidikan kreatif dan inovatif	1. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Jumlah pelaku usaha yang berbasis sektor unggulan masih	Meningkatnya jumlah pelaku usaha berbasis potensi	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI SEKARANG	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM PRIORITAS
				minim dan belum terkoordinasi	daerah yang kreatif dan inovatif	
			Mengembangkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya	Laboratorium Inovasi Daerah sebagai wahana pelaku inovasi telah terbentuk namun tidak berkelanjutan	Laboratorium Inovasi Daerah atau sejenisnya dapat berfungsi optimal dalam menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif yang berkualitas dan memiliki daya absorpsi yang tinggi di masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan
		Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat	Memperkuat jaringan inovasi antar institusi	Model kemitraan dalam jaringan inovasi masih bersifat sektoral	Meningkatnya kemitraan antara <i>triple helix</i> yang berfungsi memperluas jaringan inovasi yang integratif	Program penelitian dan pengembangan
			Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa	Belum nampak terjadi difusi inovasi dalam meningkatkan/ mendorong kegiatan ekonomi kreatif daerah	Meningkatnya penggunaan produk-produk inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan
			Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk	Belum terbangun budaya inovasi di Kabupaten Wajo, baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat	Terbangunnya budaya inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI SEKARANG	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM PRIORITAS
			lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas			
		Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Membangun model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo	Belum ada wadah inovasi daerah lingkup Pemerintah Daerah	Terbangunnya komunikasi, koordinasi antarperangkat daerah dalam penguatan SIDA	Program Penelitian dan Pengembangan
			Memperkuat program dan kegiatan kreatif dan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	Program dan kegiatan kreatif dan inovatif belum menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan	Tersedia program dan kegiatan kreatif dan inovatif yang mampu mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	Infrastruktur dasar telah ada secara umum, namun infrastruktur khusus pendukung inovasi belum teridentifikasi	Tersedianya infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah	Program penyelenggaraan statistik sektoral
		Penguatan pilar-pilar penumbuh-kembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA	Memperkuat kebijakan bagi sektor unggulan daerah yang berdaya saing	Belum tersedia <i>legal drafting</i> bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah yang bertumpu pada	Tersedianya kebijakan mengenai klaster industri prioritas daerah yang bertumpu pada	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Pelayanan Penghubung



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI SEKARANG	KONDISI YANG INGIN DICAPAI	PROGRAM PRIORITAS
		berbasis sektor unggulan untuk percepatan peningkatan perekonomian daerah		industri kreatif dan inovatif	industri kreatif dan inovatif	
			Membangun iklim investasi yang mampu mendorong sektor unggulan daerah yang lebih variatif, kreatif dan inovatif	Belum terbangun iklim investasi melalui industri, perdagangan dan jasa yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi pada sektor unggulan daerah	Meningkatnya jumlah investasi terhadap sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif	Program pengembangan iklim penanaman modal



BAB IX
INDIKATOR KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Penetapan indikator kinerja penguatan SIDA bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian SIDA. Penetapan indikator penguatan SIDA dilakukan dengan menjabarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka umum yang bersifat kondusif;
2. Kelembagaan dan daya dukung Iptek/ Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM;
3. Kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik hasil litbangyasa serta pelayanan berbasis teknologi;
4. Pengembangan budaya inovasi;
5. Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional; dan
6. Keselarasan dengan perkembangan global

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka indikator kinerja penguatan SIDA Kabupaten Wajo diuraikan sebagai berikut ini.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Penguatan Inovasi Daerah

No.	Variabel	Definisi	Indikator Kinerja
A. Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi			
1	Basis data inovasi	Seluruh data terkait pengembangan inovasi	a. Persentase data inovasi yang tersedia b. Cakupan pelayanan pemerintah yang dapat diakses secara online
2.	Regulasi yang kondusif bagi inovasi	Seluruh regulasi daerah untuk mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA	Jumlah regulasi yang mendukung inovasi
3.	Infrastruktur dasar inovasi	Infrastruktur yang mendukung inovasi	Cakupan infrastruktur TIK terkait e-government
4.	Insentif untuk inovasi	Insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pelaku inovasi	Cakupan insentif yang diberikan kepada pelaku inovasi
B. Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbangyasa serta Kemampuan Absorpsi Industri			
1.	Kelembagaan litbangyasa	Seluruh lembaga litbangyasa di daerah	Jumlah lembaga litbangyasa



No.	Variabel	Definisi	Indikator Kinerja
2.	Daya dukung iptek/litbangyasa	Seluruh sumber daya iptek/ litbangyasa	Persentase tingkat dukungan iptek dari litbangyasa
3.	Daya absorpsi UMKM	Seluruh upaya peningkatan daya absorpsi UMKM untuk memanfaatkan dan mengembangkan iptek	Persentase absorpsi UMKM yang memanfaatkan iptek
C. Kolaborasi Bagi Inovasi dan Meningkatkan Difusi Inovasi, Praktik Baik/ Terbaik Hasil Litbangyasa serta Pelayanan Berbasis Teknologi			
1.	Kemitraan strategis dankolaborasi untuk inovasi	Kerjasama antar lembaga untuk menumbuhkembangkan program strategis dan inovatif	Jumlah kerjasama antar lembaga
2.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil-hasilinovasi, baik praktik, pengetahuan atau kepakaran	Persentase difusi inovasi
3.	Pembangunan wahana interaksi pelaku inovasi	Wahana atau wadah untuk memperlancar interaksi antara pelaku inovasi	Jumlah wahana interaksi pelaku inovasi
4.	Pelayanan berbasis teknologi	Segala jenis pelayanan berbasis teknologi yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah pelayanan berbasis teknologi
D. Pengembangan Budaya Inovasi			
1	Penguatan budaya inovasimelalui pendidikan dan pelatihan	Upaya untuk mendorong budaya inovasi melalui jalur pendidikan formal dan non-formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan inovasi yang diberikan
2	Penguatan kohesi sosial	Upaya dalam mengelola teknologi masyarakat sebagai sumber inovasi dan mendorong peran serta masyarakat	Persentase teknologi yang dikelola masyarakat sebagai sumber inovasi
3	Apresiasi dan kampanyeinovasi	Memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengampanyekan budaya inovasi	Jumlah apresiasi terhadap karya inovasi
4	Penumbuhan usaha baruinovatif	Mendorong tumbuhnya wirausahawan baru yang inovatif melalui pemberian insentif	Jumlah wirausahawan baru yang inovatif
E. Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Kluster Industri Daerah dan Nasional			
1.	Prakarsa kluster industri unggulan daerah dan/ atau	Berkembangnya himpunan aktor bisnis dan non-bisnis dalam jaringan kluster industri	Jumlah kluster unggulan daerah yang terbentuk



No.	Variabel	Definisi	Indikator Kinerja
	prakarsa sistem inovasi	unggulan daerah	
2.	Koordinasi kebijakan daerah dan daerah dengan nasional	Koordinasi kebijakan antardaerah dan atau daerah dengan pemerintah pusat yang dapat memacu inovasi	Persentase tingkat koordinasi kebijakan antardaerah dan daerah dengan pusat
3.	Penguatan/ pengembangan kelembagaan khusus klaster industri yang berbasis inovasi	Terbentuknya lembaga khusus untuk mengembangkan klaster industri yang berbasis pada inovasi	Jumlah lembaga khusus klaster industri yang dibangun/ dikembangkan
F. Keselarasan dengan Perkembangan Global			
1.	Lingkungan	Prakarsa dan respon program lingkungan	Jumlah program terkait lingkungan yang diprakarsai dan direspon
2.	Standardisasi	Upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha melalui penetapan standar kualitas secara terukur	Jumlah industri yang telah mendapatkan penetapan standar kualitas
3.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Fasilitasi kepada masyarakat mengenai HKI	Jumlah paten atas produk inovasi daerah
4.	Ketenagakerjaan	Penggunaan tenaga kerja terkait dengan kegiatan industri berbasis inovasi	Jumlah tenaga kerja yang bekerja di lingkungan industri berbasis inovasi



BAB X

RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Rencana aksi Penguatan SIDA Kabupaten Wajo merupakan wujud implementasi strategi penguatan SIDA dalam jangka waktu tertentu berdasarkan program prioritas dan dilengkapi dengan indikator kinerja program penguatan SIDA. Rencana aksi yang diuraikan dalam bab ini adalah rencana aksi penguatan SIDA yang bersifat umum dan tentatif. Adapun rencana aksi penguatan SIDA secara rinci akan disusun oleh masing-masing penanggungjawab program yang telah disusun.



Tabel 9.1
Rencana Aksi Penguatan SIDA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
Mendorong penguatan kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA (T.1)	Terciptanya kondisi dan iklim yang kondusif bagi SIDA (S.1)	Penguatan regulasi dan penentuan insentif yang mendorong pengembangan SIDA	Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Sekretariat Daerah
				Program penelitian dan pengembangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
		Penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan meningkatkan kompetensi SDM	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan SIDA	Program pengembangan sumber daya manusia	---	xxx	xxx	xxx	xxx	BKPSDM
		Penguatan sistem informasi yang handal dan integratif bagi pengembangan SIDA	Mengembangkan kapasitas dan mengintegrasikan sistem informasi untuk pengembangan inovasi daerah	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	---	xxx	xxx	xxx	xxx	Disperindagkop & UKM
				Program penelitian dan pengembangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
Mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah (T.2)	Terciptanya pelaku usaha berbasis pada	Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Disporapar



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
	industri kreatif dan inovatif (S.2)	dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antar-pelaku inovasi	serta berkontribusi ke dalam sektor unggulan daerah	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Disnakertrans
			Mengembangkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya	Program Penelitian dan Pengembangan	----	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
		Peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat melalui pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antar-institusi dan partisipasi aktif masyarakat	Memperkuat jaringan inovasi antar institusi	Program penelitian dan pengembangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
			Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik/ terbaik, serta penggunaan hasil-hasil litbangyasa	Program Penelitian dan Pengembangan	---	---	xxx	xxx	Xxx	Bappelitbangda
			Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan, dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas	Program Penelitian dan Pengembangan	---	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Peningkatan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan	Membangun model komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi lintas unit pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo	Program Penelitian dan Pengembangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
			Memperkuat program dan kegiatan kreatif dan inovatif untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	---	---	xxx	xxx	xxx	Bappelitbangda
		Meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung SIDA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan	Program penyelenggaraan statistik sektoral	---	---	xxx	xxx	xxx	Diskominfotik	
		Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan untuk	Memperkuat kebijakan bagi sektor unggulan daerah yang berdaya saing	Program Pengembangan Ekspor	---	---	---	xxx	xxx	Disperindagkop & UKM
				Program Pelayanan Penghubung	---	---	xxx	xxx	xxx	Sekretariat Daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					OPD Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	
		percepatan peningkatan perekonomian daerah	Membangun iklim investasi yang mampu mendorong sektor unggulan daerah yang lebih variatif, kreatif dan inovatif	Program pengembangan iklim penanaman modal	---	---	xxx	xxx	xxx	DPMPPTSP

